



**DESAIN UNIVERSAL PEMBELAJARAN DAN
SISTEM PENILAIAN KELAS INKLUSIF BAGI MAHASISWA
DIFABEL BERBASIS PENDEKATAN INTEGRATIF**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister Pendidikan**

**Oleh:
Alimul Huda
0106514010**

**PROGRAM STUDI PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN
PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “Desain Universal Pembelajaran dan Sistem Penilaian Kelas Inklusif Bagi Mahasiswa Difabel Berbasis Pendekatan Integratif” karya,

Nama : Alimul Huda
NIM : 0106514010
Program Studi : Penelitian dan Evaluasi Pendidikan

telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Seminar Tesis.

Semarang, 11 Juli 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Masrukan, M.Si.

Dr. Sulhadi, M.Si.

NIP. 196604191991021001

NIP. 197108161998021001

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul “Desain Universal Pembelajaran dan Sistem Penilaian Kelas Inklusif Bagi Mahasiswa Difabel Berbasis Pendekatan Integratif” karya,

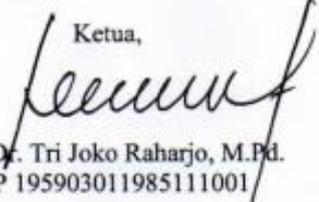
Nama : Alimul Huda
NIM : 0106514010
Program Studi : Penelitian dan Evaluasi Pendidikan

telah dipertahankan dalam sidang panitia ujian tesis Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018

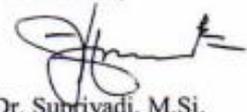
Semarang, 5 Oktober 2018

Panitia Ujian

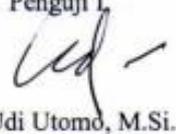
Ketua,


Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, M.Pd.
NIP 195903011985111001

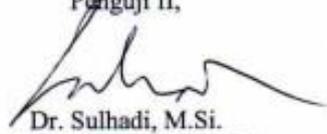
Sekretaris,


Prof. Dr. Supriyadi, M.Si.
NIP 196505181991021001

Penguji I,


Dr. Udi Utomo, M.Si.
NIP 196708311993011001

Penguji II,


Dr. Sulhadi, M.Si.
NIP 197108161998021001

Penguji III,


Dr. Masrukan, M.Si.
NIP 196604191991021001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya

Nama : Alimul Huda

NIM : 0106514010

Program Studi : Penelitian dan Evaluasi Pendidikan

menyatakan bahwa yang tertulis dalam tesis yang berjudul “Desain Universal Pembelajaran dan Sistem Penilaian Kelas Inklusif Bagi Mahasiswa Difabel Berbasis Pendekatan Integratif” ini benar-benar karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini saya **secara pribadi** siap menanggung resiko/sanksi hukum yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini.

Semarang, Juli 2018

Yang membuat pernyataan,

(Materai Rp. 6.000,00)

Alimul Huda

0106514010

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Seburuk apapun kondisi ekonomi dan fisik seseorang, jangan menjadikan penghalang untuk selalu belajar dan mencari ilmu, karena pintu gerbang kesuksesan itu bernama pendidikan.

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk orang-orang tercinta
Rina Puji Astuti
Nabila Farah Ulayya
Muhammad Virendra Alvaro
Damar Adhyastha Quthni

ABSTRAK

Huda, Alimul. 2018. Desain Universal Pembelajaran dan Sistem Penilaian Kelas Inklusif Bagi Mahasiswa Difabel Berbasis Pendekatan Integratif. *Tesis*. Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Program Pascasarjana. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. Masrukan, M.Si., Pembimbing II Dr. Sulhadi, M.Si.

Sensitifitas perguruan tinggi terhadap kaum difabel masih rendah. Masih sedikit perguruan tinggi yang memberikan akses pendidikan, fasilitas, sarana, maupun kurikulum. Kesamaan akses pendidikan bagi kaum difabel hanya terwujud dengan tersedianya kebijakan, layanan institusi terhadap mahasiswa difabel serta modifikasi lingkungan belajar, yang kesemuanya terangkum dalam sebuah desain yang sifatnya universal.

Penelitian ini mencoba mengungkap bagaimana sistem pembelajaran dan penilaian didesain secara universal, sehingga lebih aksesible bagi mahasiswa difabel. Melalui penelitian ini diharapkan bisa ditemukan sebuah formula pembelajaran dan penilaian yang menekankan prinsip-prinsip kesetaraan pada setting kelas inklusif.

Penelitian ini menggunakan metode gabungan (*mixed method*). Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, *interview*, observasi dan studi dokumen. Analisis data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan teknik statistik deskriptif, sedangkan analisis data kualitatif menggunakan siklus *interaktif* yang komponennya meliputi reduksi data (*data reduction*), sajian data (*data display*), dan penggambaran kesimpulan (*conclusion drawing*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran dan sistem penilaian yang digunakan di perguruan tinggi inklusif sudah di desain secara universal dengan mempertimbangkan aspek aksesibilitas dan melalui pendekatan integratif. Meskipun begitu jumlah bahan ajar yang berbentuk digital masih sangat minim dan perlu ada peningkatan proses pembelajaran melalui *differentiated instructional*. Sedangkan desain universal sistem penilaian dilakukan dengan menerapkan metode ujian yang lebih aksesibel dan berorientasi pada mahasiswa difabel serta menerapkan sistem penilaian yang lebih adil tanpa didasarkan pada belas kasihan.

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, *taufiq*, dan hidayah-Nya kepada penulis dan keluarga sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.

Teriring rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis selama penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih tersebut ditujukan kepada:

1. Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan beasiswa penyelesaian studi kepada penulis dalam mengikuti program pendidikan pascasarjana.
2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program LPDP dan mendapatkan bantuan beasiswa penyelesaian tesis.
3. Rektor Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di program pascasarjana S2.
4. Rektor UIN Walisongo, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk menempuh jenjang pendidikan pascasarjana S2.
5. Rektor Universitas Brawijaya dan UIN Sunan Kalijaga yang berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengambil data penelitian.
6. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M.Ag. beserta jajarannya yang terus menerus memberikan kesempatan kepada penulis untuk fokus pada penyelesaian studi.

7. Pengelola PLSD Universitas Brawijaya dan PLD UIN Sunan Kalijaga yang telah memfasilitasi penulis untuk berinteraksi dengan mahasiswa difabel
8. Seluruh mahasiswa difabel serta Dosen Universitas Brawijaya dan UIN Sunan Kalijaga yang berkenan menjadi subjek penelitian.
9. Ayahanda tercinta, Mashudi dan ibunda tercinta, Munawaroh, yang selalu mengingatkan penulis untuk selalu berusaha dan berdoa, serta Bapak Mertua Susanto dan Ibu mertua, Suwarni, yang selalu mendoakan dan mendorong penulis untuk segera menyelesaikan studi.
10. Isteri tercinta, Rina Puji Astuti, S.Pd.I. dan anak-anak penulis, Nabila Farah Ulayya, Muhammad Virendra Alvaro, dan Damar Adhyastha Quthni yang selalu memberikan motivasi dan menjadi embun penyejuk di saat-saat sulit hingga selesainya tesis ini.
11. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para saudara yang telah memberikan doanya hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dan mempermudah jalannya penyelesaian studi.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan dan pahala yang melimpah kepada Bapak/Ibu/Saudara semua. Amin.

Semarang, 11 Juli 2018

Alimul Huda

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN UJIAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Identifikasi Masalah	6
1.3.Cakupan Masalah	6
1.4.Rumusan Masalah	7
1.5.Tujuan Penelitian	7
1.6.Manfaat Penelitian	8
1.7.Penegasan Istilah	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, DAN KERANGKA

BERPIKIR

2.1 Kajian Pustaka	12
2.2 Kerangka Teoritis	15
2.2.1. Desain Universal Pembelajaran Perguruan Tinggi Inklusif	15
2.2.1.1. Definisi Pendidikan Inklusif	15
2.2.1.2. Konsepsi Difabilitas	21
2.2.1.3. <i>Universal Design for Learning</i> (UDL)	25
2.2.1.4. Kebijakan Pendidikan Tinggi Inklusif	32
2.2.1.5. Model Pembelajaran Kelas Inklusif di Perguruan Tinggi	34
2.2.1.6. Modifikasi Lingkungan Ramah Difabel	39
2.2.1.7. Urgensifitas Unit Layanan Difabel	44
2.2.2. Sistem Penilaian Kelas Inklusif di Perguruan Tinggi	46
2.2.2.1. Asessment Kebutuhan Mahasiswa Difabel	46
2.2.2.2. Asessment Pembelajaran	49
2.2.3. Pendekatan Integratif dalam Implementasi Pendidikan Tinggi Inklusif	52
2.3 Kerangka Berpikir	54

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	56
3.2 Subyek Penelitian	57
3.3 Teknik Penentuan Subjek Penelitian	58

3.4 Teknik Pengumpulan Data	62
3.5 Teknik Analisis Data	70
 BAB IV ACCESCIBILITY SISTEM PEMBELAJARAN	
4.1 Deskripsi Data Penelitia	73
4.2 <i>Accescibility</i> Pembelajaran Perspektif Mahasiswa Difabel	77
4.3 <i>Accescibility</i> Pembelajaran Perspektif Dosen	82
 BAB V ACCESCIBILITY SISTEM PENILAIAN	
5.1 <i>Accescibility</i> Sistem Penilaian Perspektif Mahasiswa Difabel	90
5.2 <i>Accescibility</i> Sistem Penilaian Perspektif Dosen	97
 BAB VI DESAIN UNIVERSAL SISTEM PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI INKLUSIF	
6.1 Perjalanan Panjang Menuju Kampus Inklusif	105
6.2 Kebijakan Perguruan Tinggi Terkait Pendidikan Inklusi	110
6.3 Aksesibilitas Perguruan Tinggi	133
6.4 Sistem Pembelajaran Mahasiswa Difabel	146
6.5 Desain Universal Pembelajaran Perguran Tingggi Inklusif Berbasis Pendekatan Integratif	166
 BAB VII DESAIN UNIVERSAL SISTEM PENILAIAN MAHASISWA DIFABEL	
7.1 Sistem Penilaian di Perguruan Tinggi Inklusif	175

7.2 Desain Universal Sistem Penilaian Perguruan Tinggi Inklusif Berbasis Pendekatan Integratif	183
7.3 Faktor Pendukung Keberhasilan Studi Mahasiswa Difabel	192
BAB VIII PENUTUP	
8.1 Kesimpulan	201
8.2 Rekomendasi	203
DAFTAR PUSTAKA	206
LAMPIRAN-LAMPIRAN	215

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Mapping Penelitian Terdahulu	14
Tabel 2.2. Jumlah Mahasiswa Difabel Tahun 2016	50
Tabel 3.1. Jumlah Mahasiswa Difabel Tahun 2016	59
Tabel 3.2. Jenis Difabilitas Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga	59
Tabel 3.3. Jenis Difabilitas Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang Tahun 2016	60
Tabel 3.4. Besar Sampel Mahasiswa Difabel UIN Sunan Kalijaga	61
Tabel 3.5. Besar Sampel Mahasiswa Difabel Universitas Brawijaya Malang	61
Tabel 3.6. Jumlah Sampel Dosen	62
Tabel 3.7. Kisi-kisi Kuesioner	64
Tabel 3.8. Sebaran Item Kuesioner	67
Tabel 4.1. Hasil Analisis <i>Descriptive Statistics</i>	77
Tabel 4.2. Data Uji Statistik Deskriptif Aksesibilitas Sistem Pembelajaran Perspektif Mahasiswa Difabel	78
Tabel 4.3. Data Uji Statistik Deskriptif Aksesibilitas Sistem Pembelajaran Perspektif Dosen	83
Tabel 5.1. Data Uji Statistik Deskriptif Aksesibilitas Sistem Penilaian Perspektif Mahasiswa Difabel	91
Tabel 5.2. Data Uji Statistik Deskriptif Aksesibilitas Sistem Penilaian Perspektif Dosen	98

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Sembilan Cara Melakukan Pembelajaran yang Adaptif	35
Gambar 2.2. Pendekatan Integratif Pendidikan Tinggi Inklusif	53
Gambar 3.1. Strategi Triangulasi Konkuren	57
Gambar 4.1 Jenis Kelamin Responden Mahasiswa Difabel	73
Gambar 4.2 Jenis Difabilitas Respoden Mahasiswa	74
Gambar 4.3 IPK Responden Mahasiswa Difabel	75
Gambar 4.4 Jenis Kelamin Responden Dosen	76
Gambar 5.1 Divisi dan Program PLD	124

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Angket Penelitian Sebelum Uji Validitas	216
Lampiran 2. Angket Penelitian Setelah Uji Validitas	228
Lampiran 3. Lembar Observasi	233
Lampiran 4. Transkripsi Hasil Wawancara	240
Lampiran 5. Rekapitulasi Hasil Angket	293
Lampiran 6. Hasil Uji Validitas Instrumen	299
Lampiran 7. Hasil Uji Statistik Deskriptif	301

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Wacana tentang pendidikan anti-diskriminatif telah lama digulirkan dan menjadi topik hangat di banyak artikel di berbagai jurnal ilmiah maupun dalam berbagai makalah di seminar ilmiah. Berbagai regulasi juga sudah mulai dimunculkan terkait dengan pendidikan kesetaraan. Hal ini menunjukkan *ghiroh* untuk menumbuhkan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Munculnya beberapa pusat layanan dan studi difabel juga menjadi indikasi adanya kepedulian terhadap para penyandang difabilitas.

Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak diimbangi dengan pemberian akses yang luas bagi penyandang difabel untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Sensitifitas perguruan tinggi terhadap kaum difabel masih rendah. Masih sedikit perguruan tinggi yang memberikan akses pendidikan, fasilitas, sarana, maupun kurikulum. Calon mahasiswa difabel tidak dapat mengikuti pendaftaran mahasiswa baru karena terkendala dengan persyaratan harus sehat jasmani dan rohani. Ini menjadi persyaratan umum di perguruan tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru (Hamidi, 2016: 654). Sehingga para difabel tidak akan bisa mengakses pendidikan di perguruan tinggi selama persyaratan tersebut masih berlaku.

Meskipun ada beberapa perguruan tinggi yang menerima calon mahasiswa difabel, namun belum banyak dukungan lingkungan maupun fasilitas yang

aksesible. Minimnya aksesibilitas ini bahkan dimulai dari saat pendaftaran mahasiswa baru. Ujian masuk yang seringkali tidak menggunakan huruf *Braille* juga menjadi kendala tersendiri bagi calon mahasiswa tuna netra (<http://nasional.sindonews.com>).

Permasalahan para difabel muncul karena adanya gangguan fisik maupun psikologis yang menghambat aktifitas sosial, ekonomi, maupun politik sehingga mengurangi hak-haknya untuk beraktifitas secara maksimal di setiap lini kehidupan. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk melakukan pemberdayaan difabel melalui rehabilitas pendidikan dan memberikan dukungan lingkungan yang aksesible baik fisik maupun non fisik (Sholikah, 2013: 57). Namun pemenuhan hak dasar pendidikan bagi para difabel sering mengalami hambatan karena minimnya insfrastuktur (Lestari, dkk., 2017: 1)

Hasil penelitian Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap mahasiswa difabel dari 11 perguruan tinggi di Yogyakarta menunjukkan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi mahasiswa difabel, yaitu: (1) proses pembelajaran belum sesuai dengan kondisi mahasiswa difabel, (2) kurangnya akses bahan ajar, (3) unit-unit layanan kampus belum memberikan akses bagi mahasiswa difabel, (4) hampir semua kampus belum aksesibel terhadap para difabel (Murtakhamah, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi belum benar-benar siap untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif.

Undang-undang nomor 19/2011 tentang Ratifikasi CRPD mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus mengakomodir mahasiswa penyandang difabilitas.

Pada pasal 24 ayat 5 dalam lampiran undang-undang tersebut menyatakan bahwa negara harus menjamin penyandang difabilitas supaya dapat mengakses pendidikan umum menengah, pelatihan kejuruan, pendidikan dewasa, dan pembelajaran seumur hidup tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya. Oleh karena itu, negara harus menyediakan lingkungan belajar yang memadai bagi penyandang difabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa penyandang difabilitas memiliki hak yang sama dalam mengakses pendidikan di perguruan tinggi.

Sistem pembelajaran dan penilaian yang digunakan perguruan tinggi juga harus mengedepankan aspek *accessibility* dan didesain secara universal. Desain universal sistem pembelajaran dan penilaian dapat berdampak positif bagi mahasiswa difabel khususnya dalam memahami materi perkuliahan (Monemi, 2009: 14). Proses interaksi antara mahasiswa difabel dengan mahasiswa lainnya juga menjadi lebih efektif (King-Sears, 2014: 92). *Universal Design for Learning* dapat memberikan pemahaman terhadap suatu konsep lebih baik daripada model konvensional (Kasi, dkk., 2016: 130). Disamping itu, desain universal sistem pembelajaran dan penilaian terbukti mampu meningkatkan prestasi belajar para difabel (Monemi, 2009: 14). Berdasarkan bukti-bukti empiris tersebut, maka sudah seharusnya jika sistem pembelajaran dan penilaian di perguruan tinggi didesain secara universal dengan mempertimbangkan aspek aksesibilitasnya.

Ada beberapa perguruan tinggi yang benar-benar konsen terhadap isu difabilitas dan memberikan akses yang luas terhadap kaum difabel. Perguruan tinggi tersebut adalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Brawijaya

Malang. UIN Sunan Kalijaga adalah satu dari sedikit perguruan tinggi yang mencoba ramah pada para difabel. Beberapa fasilitas yang disediakan bagi kaum difabel di antaranya adalah tersedia *ramp* atau tangga landai bagi para difabel, tersedia *difabel corner* yang didalamnya terdapat *Scanner* dan *software OCR (Optical Character Recognition)*, sebuah alat yang dihubungkan dengan komputer sehingga para difabel dapat memindai buku cetak/referensi menjadi file di komputer. Ada juga *CCTV (Closed Circuit Television)* yang merupakan peralatan untuk membesarkan obyek/tulisan di buku cetak sehingga dapat dibaca oleh mahasiswa *low vision*. Selain itu juga tersedia *DTB (Digital Talking Book) Player* semacam *hardware* untuk mengakses DTB, buku-buku *Braille*, buku bicara analog, buku bicara digital, buku perbesaran cetak, *ebook* dan layanan khusus seperti layanan orientasi ke dan dalam perpustakaan, layanan pelatihan penggunaan alat adaptif dan penyediaan format katalog yang aksesibel. UIN Sunan Kalijaga juga mendirikan PSLD (Pusat Layanan dan Studi Difabel) yang bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan akademik mahasiswa difabel (Murtakhamah, 2012).

Universitas Brawijaya Malang merupakan perguruan tinggi pertama yang membuka pendaftaran bagi calon mahasiswa khusus penyandang difabilitas. Penyandang difabilitas juga diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa. Mahasiswa difabel diperlakukan sama dengan mahasiswa non difabel lainnya. Beberapa fasilitas kampus juga sudah mulai diperbaiki supaya dapat diakses oleh para difabel. Beberapa fasilitas tersebut di antaranya adalah lift yang dilengkapi dengan suara, ramp, toilet khusus difabel, dan lain sebagainya.

Kedua perguruan tersebut merupakan pionir dan dapat dijadikan *pilot project* pendirian kampus inklusif yang ramah terhadap kaum difabel. Kesamaan akses pendidikan bagi kaum difabel hanya terwujud dengan tersedianya kebijakan, layanan institusi terhadap mahasiswa difabel serta modifikasi lingkungan belajar, yang kesemuanya terangkum dalam sebuah desain yang sifatnya universal. Hal ini urgen untuk dilaksanakan mengingat berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 yang dilakukan Kementerian Kesehatan RI, jumlah kaum difabel di Indonesia mencapai 15.917.051 jiwa yang terdiri dari 13.119.783 difabel ringan dan 2.797.268 difabel berat.

Ada beberapa *reasoning* mengapa penelitian ini perlu dilakukan di antaranya adalah: *pertama*, isu difabilitas dan pendidikan inklusif merupakan isu sosial yang perlu mendapatkan perhatian dari semua kalangan termasuk akademisi. *Kedua*, kaum difabel termasuk kaum marginal karena selama ini dianggap memiliki “kelainan”, dan oleh karena itu perlu mendapatkan advokasi. *Ketiga*, pendidikan inklusif yang selama ini berjalan lebih banyak berada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, sedangkan pendidikan tinggi inklusif belum mendapatkan perhatian yang serius. *Keempat*, akses pendidikan tinggi adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu termasuk difabel, oleh karena itu sangat tidak adil jika hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja. Pengembangan isu pendidikan tinggi inklusif ini merupakan salah satu langkah kampanye pendidikan universal. *Kelima*, masih banyak perguruan tinggi yang tidak menerapkan pendidikan inklusif karena berbagai alasan salah satunya adalah masalah pendanaan, oleh karena itu perlu ada pemahaman bersama tentang

pentingnya pendidikan kesetaraan dan pendidikan untuk semua. *Keenam*, belum ada standar baku tentang sistem pendidikan inklusif di perguruan tinggi, termasuk di dalamnya belum adanya standarisasi model pembelajaran dan penilaian mahasiswa difabel, sarana prasarana yang belum aksesibel, dan tidak tersedianya layanan pendukung difabel.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas ada beberapa masalah yang dihadapi terkait dengan implementasi perguruan tinggi inklusif di antaranya adalah: (1) Belum adanya standarisasi sistem pembelajaran pada perguruan tinggi inklusif, (2) Belum bakunya sistem penilaian yang digunakan pada perguruan tinggi inklusif, (3) Lingkungan perguruan tinggi inklusif belum dimodifikasi sesuai dengan kondisi mahasiswa difabel, (4) Aceptabilitas masyarakat yang masih rendah terhadap mahasiswa difabel, (5) Sistem penilaian yang dilakukan di perguruan tinggi inklusif belum aksesibel, (6) Minimnya pusat layanan difabel yang ada di perguruan tinggi, (7) Pengembangan diri mahasiswa difabel belum begitu maksimal, karena lingkungan kampus belum di desain sesuai dengan kondisi difabilitas mahasiswa.

1.3. Cakupan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini mencakup implementasi kelas inklusif di perguruan tinggi yang di dalamnya terdiri dari sistem pembelajaran, sistem penilaian, sarana prasarana, dan unit layanan difabel. Penelitian difokuskan pada

kajian mahasiswa difabel yang selama ini masih mendapatkan perlakuan diskriminatif. Permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, perlu mendapatkan solusi supaya hak pendidikan tinggi difabel benar-benar dapat terpenuhi. Esensinya mahasiswa difabel memiliki hak yang sama seperti yang lainnya, penelitian ini merupakan salah satu langkah untuk memperjuangkan dan mewujudkan hak-hak difabel tersebut.

1.4. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini di antaranya adalah:

- (1) Apakah model pembelajaran yang digunakan di perguruan tinggi sudah *accessible* bagi mahasiswa difabel?
- (2) Apakah sistem penilaian yang digunakan perguruan tinggi sudah *accessible* bagi mahasiswa difabel?
- (3) Bagaimana desain universal pembelajaran mahasiswa difabel pada kelas inklusif di perguruan tinggi berbasis pendekatan integratif?
- (4) Bagaimana desain universal sistem penilaian mahasiswa difabel pada kelas inklusif di perguruan tinggi berbasis pendekatan integratif?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Untuk menganalisis aksesibilitas model pembelajaran yang digunakan di perguruan tinggi.

- (2) Untuk menganalisis aksesibilitas sistem penilaian yang digunakan di perguruan tinggi.
- (3) Untuk menganalisis desain universal pembelajaran mahasiswa difabel pada kelas inklusif di perguruan tinggi berbasis pendekatan integratif.
- (4) Untuk menganalisis desain universal sistem penilaian mahasiswa difabel pada kelas inklusif di perguruan tinggi berbasis pendekatan integratif.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi berbagai pihak, baik secara praktis maupun secara teoritis. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang desain universal perguruan tinggi inklusif yang ramah difabel. Sehingga perguruan tinggi bisa bergerak untuk mengembangkan institusi menjadi kampus inklusif dan memberikan kesempatan yang luas bagi mahasiswa difabel untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi pertimbangan bagi *policy maker* untuk merekonstruksi kebijakan yang ada terkait implementasi perguruan tinggi inklusif.

Sedangkan secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan desain universal perguruan tinggi inklusif. Menurut pengamatan penulis masih sedikit sekali literatur yang membahas tentang pendidikan inklusif serta implementasinya di perguruan tinggi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini bisa menambah

khasanah keilmuan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan kaum difabel.

1.7. Penegasan Istilah

Dalam rangka memberikan gambaran singkat terkait penelitian ini, maka perlu dideskripsikan istilah-istilah teknis yang digunakan dalam penelitian ini.

(1) Desain universal pembelajaran

Universal Design for Learning (UDL) center menjelaskan bahwa desain universal pembelajaran adalah sebuah kerangka kerja yang mengakomodir hambatan utama difabel dalam proses pembelajaran melalui pemanfaatan metode, media dan sistem penilaian yang lebih fleksible (<http://www.udlcenter.org>). Jadi desain universal pembelajaran adalah sebuah desain pembelajaran yang bisa diakses oleh semua peserta didik tanpa melihat kondisi difabilitasnya.

(2) Desain universal sistem penilaian

Hampir selaras dengan definisi UDL, desain universal sistem penilaian merupakan suatu desain penilaian yang mengakomodir hambatan-hambatan difabel sehingga memiliki *accessibility* lebih baik bagi semua peserta didik.

(3) Pendidikan inklusif

UNESCO memberikan definisi pendidikan inklusif yaitu sebagai suatu sistem pendidikan yang diperuntukan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan baik fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa atau kondisi. Sistem pendidikan seperti ini juga diperuntukan bagi anak-anak berbakat, anak

jalanan, anak dari daerah terpencil, anak-anak etnis minoritas atau anak-anak dari kelompok marginal. Sedangkan Ro'fah, dkk (2010: xxv) mendefinisikan inklusif sebagai suatu sistem pembelajaran yang mampu mengadopsi semua kebutuhan anak tanpa terkecuali baik difabel maupun non difabel.

(4) Difabel

Difabel berasal dari kata *diffable* (difabel) yang merupakan akronim dari *differently able* (memiliki kemampuan secara berbeda). Menurut Asyabuddin (2008: 406-519) istilah difabel merupakan sebuah pengakuan terhadap kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki perbedaan fisik maupun psikologis dengan orang lain. Esensinya kaum difabel memiliki kemampuan yang sama dengan orang-orang normal namun mereka melakukannya dengan cara yang berbeda.

(5) Pendekatan integratif

Ritzer (2010: 697) mengajukan konsep paradigma integratif dengan menggabungkan tiga paradigme, yaitu paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Ketiga paradigme tersebut memiliki subject matter yang berbeda, yang meliputi semua tingkatan realitas, baik tingkat makro-obyektif seperti masyarakat, hukum, birokrasi dan bahasa, tingkat makro-subyektif seperti nilai, norma dan budaya, tingkat mikro-obyektif seperti pola perilaku, tindakan, dan interaksi, serta tingkat mikro-subyektif seperti persepsi dan keyakinan.

Pendekatan integratif dalam penelitian ini didefinisikan sebagai suatu pendekatan terpadu yang menggabungkan aspek fakta, persepsi maupun

perilaku sosial. Lebih spesifik, melalui pendekatan ini diharapkan diketahui bagaimana fakta, persepsi dan perilaku masyarakat kampus terhadap mahasiswa difabel. Pendekatan integratif ini digunakan untuk menghasilkan sebuah konsep desain universal perguruan tinggi inklusif yang komprehensif.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1. Kajian Pustaka

Penelitian yang secara eksplisit membahas tentang desain universal sistem pembelajaran dan penilaian masih terbatas. Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Access, Universal Design and the Sustainability of Teaching Practices: a Powerful Synchronicity of Concepts at a Crucial Conjunction for Higher Education. Penelitian yang dilakukan Fovet (2017:122) menunjukkan bahwa *universal design for learning* (UDL) telah merubah diskursus difabilitas dari wacana minoritas menjadi mayoritas di perguruan tinggi. UDL juga ikut berperan dalam mempercepat program pendidikan berkelanjutan bagi difabel.

Curriculum Planning for All Learners: Applying Universal Design for Learning (UDL) to a High School Reading Comprehension Program. Penelitian ini dilakukan oleh Meo (2008: 27). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa UDL mampu meningkatkan kemampuan peserta didik difabel. Kurikulum yang didesain berdasarkan prinsip UDL terbukti mampu memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam.

An Exploratory Study of Universal Design for Teaching Chemistry to Students With and Without Disabilities. Studi tersebut dilakukan oleh King-Sears (2014: 92) dengan kesimpulan bahwa implementasi *Universal Design for*

Learning (UDL) telah mampu meningkatkan proses interaksi peserta didik difabel selama proses pembelajaran.

Teachers Perseptions of Barriers to Universal Design for Learning. Penelitian yang dilakukan Anstead (2016: 64) menunjukkan bahwa implementasi *Universal Design for Learning* (UDL) membutuhkan lebih banyak waktu dan energi, sehingga guru keberatan untuk menerapkan UDL dalam proses pembelajaran di kelas.

Project Design Principles and Applications Using Universal Design Learning (UDL). Studi yang dilakukan Monemi (2009: 14) tersebut menyimpulkan bahwa *Universal Design for Learning* (UDL) dapat membantu siswa difabel dalam memahami materi pelajaran. Disamping itu prestasi dan hasil karya tim siswa menjadi lebih baik, karena proses pembelajaran dilaksanakan secara kolektif dengan sistem *peer teaching*.

Penerapan Pembelajaran IPA Terpadu Berbasis *Universal Design for Learning* (UDL) untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep Siswa di Sekolah Inklusi Pada Materi Tekanan Zat Cair. Penelitian yang dilakukan oleh Kasi, dkk., (2016: 130) menunjukkan bahwa *Universal Design for Learning* (UDL) memberikan penguasaan konsep lebih baik dari pada metode diskusi. Selain itu UDL dapat meningkatkan ketrampilan kerja dan rasa percaya diri siswa.

Tabel 2.1.

Mapping Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Penelitian tentang Pembelajaran Kelas Inklusif	Penelitian tentang Penilaian Kelas Inklusif	Keterangan
1	Fovet (2017)	√	-	P
2	Meo (2008)	√	-	P
3	King-Sears (2014)	√	-	P
4	Anstead (2016)	√	-	N
5	Monemi (2009)	√	-	P
6	Kasi, dkk., (2016)	√	-	P

Keterangan:

P : Hasil penelitian positif terhadap sistem pembelajaran dan penilaian kelas inklusif

N : Hasil penelitian negatif terhadap sistem pembelajaran dan penilaian kelas inklusif

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa penelitian tentang desain universal pembelajaran dan penilaian mahasiswa difabel masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian tentang desain universal yang sudah ada menyatukan antara pembelajaran dan penilaian. Penilaian menjadi salah satu domain dalam proses pembelajaran. Dari keenam penelitian tersebut hanya penelitian Anstead yang menunjukkan hasil negatif dari implementasi *Universal Design for Learning* (UDL).

2.2. Kerangka Teoritis

2.2.1. Desain Universal Pembelajaran Perguruan Tinggi Inklusif

2.2.1.1. Definisi Pendidikan Inklusif

The Jomtien World Conference on Education for All yang diadakan oleh UNESCO pada tahun 1990 merupakan cikal bakal munculnya konsep pendidikan kesetaraan. Meskipun istilah pendidikan inklusif belum terdefinisikan secara jelas, namun konferensi ini telah menumbuhkan motivasi bagi kalangan akademisi untuk merekonstruksi sistem pendidikan yang diskriminatif khususnya bagi kaum difabel.

Pada tahun 1994 melalui *The Salamanca World Conference on Special Needs Education*, UNESCO merumuskan konsep pendidikan inklusif secara jelas. UNESCO mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai suatu sistem pendidikan yang diperuntukan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan baik fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa atau kondisi lainnya harus diakomodir oleh sekolah. Selain itu anak berbakat, anak jalanan, anak dari daerah terpencil, anak-anak etnis minoritas atau anak-anak dari kelompok marginal juga harus diakomodir dalam sebuah sistem pendidikan untuk semua.

Pendekatan inklusif digunakan untuk mengakomodir berbagai hambatan dan sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia (Santoso dan Apsari, 2017: 166). Setiap manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan pendidikan yang baik tanpa melihat hambatan atau keterbatasan fisik maupun psikologis seseorang. Sehingga seharusnya tidak ada perbedaan antara difabel dan non difabel.

Konsep pendidikan inklusif didasarkan pada kenyataan bahwa setiap individu memiliki karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu lingkungan pendidikan harus didesain dengan mempertimbangkan aspek kesetaraan dan tidak melihat perbedaan individu (Sharma, 2015: 320). Dalam konteks difabilitas, perbedaan kondisi fisik maupun psikologi tidak menjadi hambatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan setara seperti anak-anak lainnya.

Lebih spesifik Ro'fah, dkk (2010: xxv) mendefinisikan inklusif sebagai sebuah istilah yang mengacu pada suatu sistem pembelajaran yang mampu mengadopsi semua kebutuhan anak tanpa terkecuali. Sedangkan secara konseptual pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan yang mengikutsertakan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) belajar bersama anak sebayanya di kelas reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Alimin (2009: 7). Prinsip dasar yang menjadi karakter pendidikan inklusif adalah menghindari *pelabelan* atau stigma negatif pada siswa difabel (Ilahi, 2013: 52).

Menurut Sutrisno seperti dikutip Haryono, dkk. (2015: 119-120) melalui pendidikan inklusif difersitas karakter dan kecakapan peserta didik diakomodir dengan baik yaitu dengan memberi ruang kepada setiap orang untuk belajar tanpa melihat kondisi fisik maupun psikologisnya. Perbedaan kondisi peserta didik dianggap sebagai sumber belajar dan tidak menganggap itu sebagai suatu masalah.

Menurut Direktorat PSLB (2007) pendidikan inklusif memiliki empat karakteristik makna yaitu: (1) Pendidikan inklusif adalah proses yang berjalan terus dalam usahanya menemukan cara-cara merespon keragaman individu anak,

(2) Pendidikan inklusif berarti memperoleh cara-cara untuk mengatasi hambatan-hambatan anak dalam belajar, (3) Pendidikan inklusif membawa makna bahwa anak mendapat kesempatan untuk hadir di sekolah, berpartisipasi dan mendapatkan hasil belajar yang bermakna dalam hidupnya, dan (4) Pendidikan inklusif diperuntukkan bagi anak-anak yang tergolong marginal, eksklusif dan membutuhkan layanan pendidikan khusus dalam belajar.

Tujuan dari pendidikan inklusif itu sendiri menurut Gargiulo dalam Mudjito, dkk. (2012: 13) adalah *pertama*, memberikan intervensi kepada peserta didik difabel sedini mungkin supaya dapat meminimalkan keterbatasan perkembangan anak dan memaksimalkan kesempatan berinteraksi dalam aktivitas normal. *Kedua*, mencegah terjadinya kondisi yang lebih parah dalam ketidakteraturan perkembangan sehingga menjadi anak yang tidak berkemampuan. *Ketiga*, mencegah berkembangnya keterbatasan kemampuan lainnya sebagai hasil dari ketidakmampuan utamanya.

Sedangkan tujuan pendidikan inklusif atau pendidikan khusus di perguruan tinggi seperti tertuang dalam pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus pada Pendidikan Tinggi, yaitu: *pertama*, memperluas akses dan kesempatan bagi warga negara penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan tinggi. *Kedua*, memperluas akses dan kesempatan bagi warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan tinggi. *Ketiga*, menyediakan akses dan perlakuan khusus bagi mahasiswa penyandang disabilitas

yang disesuaikan dengan disabilitasnya dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan berbagai aktifitas lainnya di perguruan tinggi sehingga mereka dapat mencapai kinerja dan prestasi secara optimal. *Keempat*, menyediakan perlakuan khusus bagi mahasiswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dalam mengikuti kegiatan pendidikan di perguruan tinggi sehingga mereka dapat mengoptimalkan keunggulan dan potensi yang dimiliki.

Berdasarkan tujuan pendidikan inklusif pada tingkat dasar dan menengah dengan pendidikan inklusif di perguruan tinggi dapat dipahami perbedaan yang mendasar yaitu pendidikan inklusif di tingkat dasar diorientasikan untuk meminimalisir keterbatasan perkembangan peserta didik difabel sedangkan pendidikan inklusif di perguruan tinggi lebih cenderung pada pengembangan diri mahasiswa difabel.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus mempertimbangkan tiga aspek yaitu: *pertama*, aspek afordabilitas yaitu keterjangkauan pendidikan oleh setiap lapisan masyarakat. Pendidikan bukan barang mahal yang hanya bisa dijangkau oleh orang-orang tertentu saja. *Kedua*, aspek acceptabilitas, yaitu lembaga pendidikan harus mau dan mampu menerima peserta didik dengan berbagai kondisi dan latar belakang yang berbeda. *Ketiga*, aspek akomodasi/aksesibilitas yaitu bahwa lembaga pendidikan harus bisa diakses oleh siapapun tanpa melihat kondisi fisik, latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya (Yulianto, 2014: 29).

Kaitannya dengan akomodasi dalam implementasi pendidikan inklusif, Skjorten mengidentifikasi ada tiga hal yang harus dilakukan lembaga pendidikan yaitu: *pertama*, lingkungan, yang meliputi lingkungan fisik, sistem pembelajaran

dan lingkungan sosial, ekonomi, serta politik. *Kedua*, faktor dalam diri peserta didik yang bisa meliputi motivasi, kompetensi sosial, kemampuan komunikasi verbal atau non verbal, kreatifitas maupun yang lainnya. *Ketiga*, hakekat dan tingkat kebutuhan khusus, dimana setiap individu memiliki kebutuhan khusus yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi difabel (Johnsen and Skjorten, 2001).

Johnsen and Skjorten (2001) mengemukakan bahwa ada tiga prinsip utama yang harus dipegang lembaga pendidikan dalam melaksanakan pendidikan inklusif. Tiga prinsip tersebut adalah, *pertama*, setiap anak merupakan bagian integral dari komunitas yang ada. Seperti anak lainnya, anak-anak difabel juga tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Hal ini diperlukan guna menumbuhkan kepercayaan diri siswa difabel dalam interaksi sosialnya. *Kedua*, kegiatan pembelajaran harus dilakukan dengan pendekatan kooperatif, berorientasi pada individu, dan bersifat fleksibel. *Ketiga*, guru harus mampu bekerjasama dan memiliki kompetensi dalam melakukan setting pembelajaran umum, khusus, dan individual. Disamping itu guru harus mampu menghargai pluralitas, khususnya dalam pengelolaan kelas.

Reid seperti dikutip Sunanik (2013: 21) menjelaskan bahwa pendidik memiliki tanggungjawab penuh dalam proses pembelajaran kelas inklusif. Pendidik harus memiliki banyak ketrampilan dalam mengelola heterogenitas kemampuan peserta didik. Disamping itu pendidik harus melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam proses pembelajaran. Penyesuaian ini perlu dilakukan supaya peserta didik difabel dapat mengikuti pelajaran dengan baik.

Mitchell & Brown dalam Ajuwon (2008: 11) menyatakan bahwa pendidikan inklusif memungkinkan peserta didik untuk mempelajari keterampilan sosial dalam setting lingkungan yang heterogen dan normal. Perkembangan Bahasa siswa difabel menjadi lebih efektif ketika mereka berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak-anak yang berbicara normal. Kemampuan sosial difabel dapat berkembang dengan baik melalui interaksi dengan lingkungannya (Agustriyana dan Nisa, 2017: 15)

Dalam lingkup pendidikan tinggi, perguruan tinggi inklusif bisa dimaknai sebagai layanan pendidikan tinggi yang mengakomodir mahasiswa difabel serta menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh mahasiswa difabel. Esensinya pendidikan inklusif di perguruan tinggi sama dengan pendidikan inklusif di jenjang sekolah dasar dan menengah, namun secara konseptual ada perbedaan mendasar terkait inklusifitas perguruan tinggi. *Pertama*, mahasiswa difabel harus mampu memahami dan mengaplikasikan tri dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa difabel juga dituntut untuk bisa mandiri baik secara akademik maupun non akademik. *Kedua*, paradigma pendidikan tinggi inklusif dapat dibagi ke dalam dua paradigma, yaitu paradigma inklusif parsial dan paradigma inklusif holistik (Fikri, 2014: 119-120).

Paradigma inklusif parsial hanya melihat perguruan tinggi inklusif dari sisi ketersediaan unit layanan difabel. Semua yang terkait dengan kebutuhan mahasiswa difabel disediakan oleh unit tersebut, sehingga para pemegang *policy* kampus merasa tidak perlu untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa difabel

tersebut. Dengan demikian, secara personal maupun struktural paradigma inklusif belum menyatu ke seluruh komponen kampus. Sedangkan paradigma inklusif holistik dapat dipahami bahwa perguruan tinggi telah memahami dan menyediakan kebutuhan mahasiswa difabel. Dalam paradigma inklusif holistik hal terpenting yang perlu dipenuhi adalah aksesibilitas perguruan tinggi. Aksesibilitas tersebut meliputi aksesibilitas lingkungan fisik, aksesibilitas layanan akademik, dan aksesibilitas proses belajar mengajar (Fikri, 2014: 119-120). Muktiyo (2016: 13) menjelaskan bahwa pembangunan inklusif harus fokus pada pilar pembangunan inklusif, salah satunya adalah inklusi sosial termasuk akses kesehatan dan pendidikan, infrastruktur dasar, dan pengarusutamaan gender. Dalam hal ini inklusifitas harus dipahami secara makro, tidak hanya dalam dunia pendidikan dalam kehidupan sosial masyarakat harus menumbuhkan budaya inklusi.

2.2.1.2. Konsepsi Difabilitas

World Health Organization (WHO) dalam *International Classification of Functioning, Disability, and Health* atau ICF (2001) mendefinisikan *disability* sebagai hasil interaksi dari keterbatasan yang dialami individu dengan lingkungannya baik secara fisik maupun psikologi. Fenomena ini melibatkan berbagai aspek mulai dari keterbatasan fungsi tubuh, kendala aktivitas, hambatan partisipasi, sampai dengan aspek lingkungan. Keterbatasan fungsi fisik maupun psikologi bisa disebabkan karena kelainan sejak lahir maupun disebabkan karena faktor kecelakaan maupun karena penyakit (Nurhayati dan Cahyati, 2016: 88)

Sejarah mencatat, ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang memiliki “keberbedaan” kondisi fisik maupun mental. Istilah-istilah yang berbau diskriminatif seperti penyandang cacat dan penyandang ketunaan, pada awalnya digunakan untuk merujuk orang-orang yang secara khusus memiliki “keistimewaan fisik dan mental”. Meskipun undang-undang telah menetapkan istilah *person with disabilities*, namun pemakaian istilah-istilah yang merujuk pada sikap diskriminatif masih tetap digunakan (Maftuhin, 2016: 159). Hal ini tidak terlepas dari paradigma yang selama ini digunakan masyarakat dalam memahami hambatan seseorang baik secara fisik maupun psikologis.

Paradigma lama tentang difabilitas menyebutkan bahwa orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental diasosiasikan sebagai orang cacat yang membutuhkan pertolongan orang lain. Paradigma ini disebut sebagai *medical model*, yaitu sebuah model yang memandang kecacatan/*impairment* sebagai akibat dari kondisi kelainan fisik semata, dimana *impairment* dianggap sebagai bagian integral diri individu yang bersangkutan yang menyebabkan adanya hambatan aktifitas atau ketidakberuntungan sosial lainnya (Barnes dalam Yulianto, 2014: 21).

Medical model paradigm ini memandang seseorang berdasarkan standar normalisme, dimana difabilitas dilihat dari keberfungsian atau normalitas anggota tubuh maupun kondisi psikologisnya (Sinulingga, 2015: 35). Jadi menurut paradigma ini, *impairment* harus ditangani secara medis, supaya seseorang dapat beraktifitas seperti orang normal. Paradigma ini memiliki implikasi psikologis

yang cukup besar, dimana masyarakat melihat kondisi “keberbedaan” tersebut sebagai sebuah ketidakberuntungan sehingga mereka perlu dikasihani.

Paradigma *medical model* juga memunculkan istilah *disable* yang secara bahasa berarti “ketidakmampuan”. Istilah ini melihat orang-orang yang memiliki kelainan fisik sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan aktifitas apapun, termasuk dalam bidang pekerjaan. Oleh karena itu orang-orang dengan kondisi *impairment* perlu direhabilitasi supaya dapat beraktifitas seperti orang normal. Hal ini kontradiktif dengan kondisi yang sebenarnya, dimana fakta memperlihatkan bahwa orang-orang yang memiliki kelainan fisik juga dapat melakukan aktifitas seperti orang normal lainnya. Sejarah Indonesia mencatat salah satunya presidennya KH Abdurrahman Wahid atau Gusdur adalah orang yang memiliki keterbatasan penglihatan, namun mampu memimpin bangsa Indonesia.

Paradigma *medical model* dirasa sebagian orang sangat diskriminatif, sehingga pada abad 20-an masyarakat sipil Eropa, khususnya yang memiliki keterbatasan fisik melakukan penolakan terhadap model-model institusionalisasi seperti panti rehabilitasi, sekolah khusus maupun sekolah luar biasa. Mereka memandang bahwa keterbatasan fungsional salah satu atau beberapa organ tubuh tidak memiliki korelasi langsung terhadap ketidakmampuan aktifitas maupun partisipasi sosial lainnya (Yulianto, 2014: 22). Paradigma ini disebut dengan *social model*. Paradigma model sosial ini sebagai langkah penolakan terhadap anggapan *dependency* (ketergantungan) dan abnormalitas kaum difabel (578).

Social model paradigm melahirkan pendekatan berbasis hak dalam memahami keberbedaan fisik maupun psikologi. Model ini mengakui bahwa sebagian orang yang mempunyai variasi fisik, sensori, intelektual, atau psikologis, yang mengakibatkan keterbatasan fungsi atau ketunaan pada individu, tidak harus dipandang sebagai “ketidakmampuan”, kalau masyarakat dapat menghargai dan menginkluskikan semua orang tanpa memandang perbedaan-perbedaan individu.

Social model pada akhirnya juga memunculkan istilah baru yaitu *diffability* (difabilitas) yang merupakan akronim dari *different ability* (kemampuan yang berbeda). Sedangkan orang-orangnya disebut dengan *diffable* (difabel) yang merupakan akronim dari *differently able* (memiliki kemampuan secara berbeda). Istilah ini menurut Asyabuddin merupakan sebuah pengakuan terhadap kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki perbedaan fisik maupun psikologis dengan orang lain. Perubahan ini dilakukan untuk mengubah stigma negatif yang dibangun oleh masyarakat “normal”, bahwa kaum “cacat” tidak memiliki manfaat bagi kehidupan dan hanya menjadi beban (Asyabuddin, 2008: 406-519).

Istilah difabel juga mendekonstruksi gambaran negatif tentang konsepsi kecatatan, yaitu *pertama*, pengistilah difabel mencoba melepaskan hubungan kausatif antara keterbatasan fungsi fisik maupun mental, hambatan aktifitas, serta ketidakberuntungan sosial. *Kedua*, konsepsi ini menggeser standar normalisme sebagai sebuah realitas. *Ketiga*, konsepsi difabilitas tidak menempatkan satu kelompok sebagai inferior dan lain sebagai superior (Yulianto, 2014: 25).

2.2.1.3. Universal Design for Learning (UDL)

Social model of disability dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia telah melahirkan ideologi pendidikan inklusif. Namun dalam implementasinya, pendidikan inklusif lebih didominasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dalam praktiknya belum banyak perguruan tinggi yang membuka aksesnya bagi mahasiswa difabel. Beberapa perguruan tinggi yang telah memproklamkan diri sebagai kampus inklusif juga belum benar-benar memiliki desain pendidikan tinggi yang sifatnya universal. Universalisme ini penting untuk menghindari stigma dan segregasi (Chapireau, 2005: 310).

Desain universal adalah pendekatan desain suatu fasilitas bagi semua pengguna tanpa batasan fisik, umur dan kelamin (<http://bilic.idp-europe.org>). Story dalam Kusumarini dan Utomo (2008: 87) mendefinisikan desain universal; *as the design of products and environments to be usable to the greatest extent possible by people of all ages and abilities*. Dalam konteks ini, desain universal dipahami sebagai sebuah desain produk atau lingkungan yang dapat digunakan semaksimal mungkin oleh semua orang tanpa melihat batasan usia maupun keterbatasan fisik lainnya.

Desain universal mengacu pada ide-ide spektrum luas yang dimaksudkan untuk menghasilkan bangunan, produk, dan lingkungan yang inheren, dapat diakses oleh orang tua, non-difabilitas, dan penyandang difabilitas (Sholeh, 2014: 15). Prinsip-prinsip dalam desain universal menurut Story dalam Kusumarini dan Utomo (2007 : 87-88) adalah sebagai berikut :

(1) *Equitable Use*

Desain yang dapat digunakan secara wajar oleh semua orang dengan variasi kemampuannya dan tidak menstigmakan penggunanya.

(2) *Flexibility in Use*

Desain yang fleksibel dan dapat mengakomodasi kebutuhan aktivitas semua orang (sebagai pengguna) secara umum, tanpa batasan fisik, rentang usia, dan juga jenis kelamin.

(3) *Simple and Intuitive Use*

Desain yang cara penggunaannya mudah dimengerti, tanpa tuntutan pengalaman penggunaan, pengetahuan, dan kemampuan bahasa tertentu.

(4) *Perceptible Information*

Desain yang mengkomunikasikan atau mengakomodasikan informasi dengan efektif kepada pengguna, dan dekat dengan kondisi ambang dan atau kemampuan sensor pengguna.

(5) *Tolerance for Error*

Desain yang meminimalkan dampak dan konsekuensi kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan dari tindakan yang keliru.

(6) *Low Physical Effort*

Desain yang dapat digunakan secara efisien dan nyaman dengan usaha kekuatan fisik minimal (tidak melelahkan).

(7) Size and Space for Approach and Use

Desain dengan terapan ukuran dan ruang yang mudah (cukup) untuk pencapaian, dan dapat digunakan tanpa batasan ukuran, postur, dan mobilitas pengguna.

Istilah “desain universal” yang digunakan dalam literatur merujuk pada desain karya-karya manusia seperti sebuah objek, bangunan, software dan lainnya yang aksesibel dan dapat digunakan oleh semua orang termasuk orang tua dan kalangan difabel (Fogli, dkk, 2014: 207). Terminologi tersebut awalnya digunakan untuk desain benda fisik, namun dalam perkembangannya digunakan juga untuk lingkungan non fisik. Penjelasan Story tentang desain universal yang diantaranya menyangkut lingkungan, dapat dipahami secara fisik dan non fisik. Lingkungan non fisik misalnya lingkungan sosial, lingkungan pembelajaran, termasuk merujuk pada cara atau proses-proses tertentu seperti metode pembelajaran dan sistem penilaian.

Friend dan Bursuck (2015: 268) menjelaskan bahwa desain universal dalam proses pembelajaran adalah merancang materi, metode, dan asesmen pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa difabel serta meminimalkan akomodasi. Contohnya ketersediaan alternatif media cetak seperti gambar, video, dan teks digital dapat memberikan akses terhadap muatan pelajaran yang siap pakai bagi peserta didik difabel maupun non difabel.

Sejalan dengan pendapat Friend dan Bursuck tersebut, desain universal pendidikan tinggi inklusif dalam penelitian ini maksudnya adalah sebuah desain pendidikan yang mengakomodir semua kebutuhan mahasiswa baik difabel

maupun non difabel, sehingga semua aktifitas maupun fasilitas kampus dapat diakses dengan mudah oleh semua mahasiswa tanpa melihat keterbatasan fisik. Dalam konteks ini desain universal tidak hanya diperuntukan bagi fasilitas fisik namun juga non fisik seperti metode pembelajaran, sistem penilaian, maupun pelayanan akademik lainnya.

Dalam proses pembelajaran kelas inklusif sudah dikenal *Universal Design for Learning* (UDL). UDL adalah kerangka kerja yang mengakomodir hambatan utama difabel dalam proses pembelajaran. UDL membantu pendidik mengatasi variabilitas peserta didik dengan menggunakan metode, media, dan penilaian yang lebih fleksibel. Kurikulum yang di desain menggunakan UDL dirancang sejak awal untuk memenuhi kebutuhan semua peserta didik (<http://www.udlcenter.org>).

Tujuan awal dari kerangka UDL adalah untuk melayani siswa dengan kebutuhan khusus serta menyediakan dan mempromosikan lingkungan belajar yang inklusif untuk semua anak (Tegmark, 2011: 17). UDL diorientasikan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang ramah bagi semua peserta didik tanpa melihat kondisi fisik maupun mental peserta didik.

UDL memberikan kemudahan bagi pendidik untuk melaksanakan pembelajaran terhadap peserta didik yang lebih beragam di kelas inklusif. Penelitian yang dilakukan oleh Courey *et al.* (2012) menunjukkan hasil bahwa proses pembelajaran yang dilakukan menggunakan desain universal lebih efektif bagi mahasiswa difabel. Peserta didik juga mampu memahami materi yang disampaikan oleh guru baik dari segi konten maupun pedagoginya (Marino, et.all, 2014).

National Center On Universal Design for Learning (NCUDL) mengemukakan tiga prinsip UDL sebagai berikut: *pertama*, prinsip "*sebagai sarana representasi*" mengacu pada beberapa alat percobaan sederhana, bahasa, ekspresi, simbol, dan merupakan salah satu pedoman yang menyediakan pilihan untuk penguasaan konsep. *Kedua*, prinsip "*sebagai sarana ekspresi dan tindakan*" mencakup pedoman untuk beberapa sarana tindakan fisik, ekspresi dan komunikasi, dan fungsi eksekutif. *Ketiga*, prinsip "*keterlibatan*" mengacu pada beberapa cara merekrut, mempertahankan usaha, ketekunan siswa dan *self-regulation* siswa. (<http://www.udlcenter.org>)

Universal desain dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dengan menerapkan strategi manajemen diri, menggunakan berbagai media baik visual maupun verbal, memaksimalkan fungsi fasilitator (relawan), dan memberikan tugas yang berisi permasalahan praktis yang dihadapi mahasiswa difabel (Sears, et.all, 2014: 84).

Gradel & Edson (2009: 112) mengemukakan bahwa UDL sangat relevan diterapkan di perguruan tinggi. UDL merupakan pendekatan yang dapat membantu pendidik untuk merespon keragaman akademik peserta didik. Dalam konteks difabilitas, UDL digunakan untuk mengakomodir berbagai hambatan peserta didik baik fisik maupun psikologis.

Desain universal pendidikan tinggi perlu diupayakan supaya tidak ada sekat antara mahasiswa difabel dan non difabel. Desain universal difungsikan sedapat mungkin bagi semua kelompok pengguna secara inklusif, sehingga mahasiswa difabel tidak terpisah dengan mahasiswa lainnya yang notabene

normal secara fisik (Kusumarini dan Utomo, 2008: 88). Mahasiswa difabel selama ini mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan di perguruan tinggi karena belum adanya desain yang sifatnya universal.

Setidaknya ada tiga hambatan yang dialami kaum difabel dalam mengakses pendidikan tinggi yaitu: *pertama*, hambatan attitudinal, yaitu hambatan yang dialami setiap individu difabel terkait dengan sikap, perilaku, penerimaan dari keluarga, masyarakat sekitar, serta penyelenggara pendidikan tinggi. *Kedua*, hambatan institusional, yaitu hambatan terkait dengan kebijakan institusi, baik dalam level kampus maupun dalam level yang lebih tinggi yang menolak difabel untuk kuliah, kebijakan bagi difabel untuk belajar di hanya satu disiplin ilmu tertentu, atau bahkan kebijakan menerima difabel namun tidak menyediakan kebutuhan akademik mahasiswa difabel. *Ketiga*, hambatan environmental barrier, yaitu hambatan dari lingkungan yang seringkali tidak aksesibel seperti transportasi dan kondisi jalan yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan difabel. Sehingga para difabel merasa kesulitan mengakses fasilitas publik (Yulianto, 2012: 100-103).

Hasil studi Dalia Sachs (2011) menunjukkan bahwa perguruan tinggi perlu membuka diri terhadap keberadaan mahasiswa difabel serta melakukan identifikasi terhadap jenis akomodasi dan layanan yang diperlukan mahasiswa difabel. Prosedur penerimaan mahasiswa difabel harus lebih fleksibel, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk masuk ke perguruan tinggi. Disamping itu penyesuaian dan akomodasi harus mempertimbangkan hambatan temporal mahasiswa difabel. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mempersiapkan

teknologi informasi yang dapat diakses oleh mahasiswa difabel. Dan yang paling penting adalah perlu adanya perubahan sikap masyarakat kampus dalam melihat keberagaman, khususnya terkait difabilitas, karena ini merupakan pra syarat terciptanya perguruan tinggi inklusif.

Asyabuddin (2008: 406-519) juga berpendapat bahwa perlu ada perubahan untuk dapat mengaplikasikan pendidikan inklusif di perguruan tinggi yaitu: *pertama*, perubahan sikap. Pendidikan inklusif mensyaratkan adanya perubahan sikap dari para pendidik dan peserta didik lain tentang adanya keragaman di dalam hidup. Maka dengan itu, para pendidik dan peserta didik akan mampu untuk menerima bahwa ada sebagian teman mereka yang berbeda. *Kedua*, perubahan kurikulum. Kurikulum untuk kelas yang relatif homogen tentu saja tidak cocok untuk digunakan di kelas yang berisi orang-orang yang berbeda-beda. Kelas yang berisi campuran antara kaum difabel dan kaum non-difabel tentu membutuhkan kurikulum yang berbeda dengan kelas yang hanya berisi kaum non-difabel atau kaum difabel belaka. *Ketiga*, perubahan lingkungan. Kelompok difabel membutuhkan lingkungan yang aksesibel bagi mereka. Orang-orang yang berjalan dengan menggunakan kursi roda tentu membutuhkan ruang dan jalan yang berbeda dengan orang-orang yang berjalan dengan kaki. Wardany, dkk., (2017: 27) mengemukakan bahwa salah satu hak yang penting bagi individu difabel adalah hak mendapatkan aksesibilitas di ruang publik. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan akses yang dapat memenuhi kebutuhan individu difabel guna pemenuhan hak mereka sebagai warga negara.

Hambatan-hambatan di atas dapat diminimalisir dengan membuat desain pendidikan tinggi yang sifatnya universal atau dapat diakses secara mudah baik oleh mahasiswa difabel maupun mahasiswa non difabel. Upaya tersebut perlu dilakukan supaya tercipta pendidikan universal, pendidikan untuk semua, dan pendidikan yang tidak diskriminatif.

2.2.1.4. Kebijakan Pendidikan Tinggi Inklusif

Menurut Widyantini (2015: 178-179) Undang-undang difabilitas harus sesuai dengan standar hak asasi manusia yang bisa dicapai melalui beberapa langkah yaitu: *pertama*, perlu dibentuk lembaga independen yang melindungi hak-hak kaum difabel; *kedua*, perlu ada sinergitas antar lembaga atau kementerian dalam mengelola isu difabilitas yang sifatnya multi sektoral; *ketiga*, melakukan penyesuaian bidang pekerjaan yang sesuai dengan kondisi difabilitas; *keempat*, membuat kebijakan afirmatif terhadap pelayanan public; *kelima*, memprioritaskan pendidikan inklusi; *keenam*, meningkatkan pelayanan habilitasi dan rehabilitas; *ketujuh*, penguatan kebijakan dibidang hukum dan agama.

Kebijakan yang secara eksplisit mengamanatkan pendidikan tinggi inklusif tertera dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus pada Pendidikan Tinggi. Pasal 2 dalam Permendikbud tersebut menyebutkan bahwa tujuan dari penyelenggaraan pendidikan khusus di perguruan tinggi adalah: 1) memberikan akses bagi difabel untuk mengikuti pendidikan tinggi; 2) memperluas akses bagi

setiap warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat khusus; 3) menyediakan akses dan perlakuan khusus bagi mahasiswa penyandang difabilitas dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan berbagai aktivitas lainnya di perguruan tinggi sehingga dapat mencapai kinerja dan prestasi yang optimal; 4) menyediakan perlakuan khusus bagi mahasiswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dalam mengikuti kegiatan pendidikan di perguruan tinggi sehingga dapat mengoptimalkan keunggulan dan potensi kecerdasan tersebut.

Regulasi tersebut memberikan ruang kepada difabel untuk mengakses pendidikan tinggi inklusif. Namun belum ada klausul yang mewajibkan perguruan tinggi untuk melaksanakan pendidikan inklusif. Klausul ini penting guna mengantisipasi penolakan perguruan tinggi terhadap mahasiswa difabel. Disamping itu, juga belum ada klausul tentang sanksi. Terhadap perguruan tinggi yang menolak menerima mahasiswa difabel.

Menurut Abdullah Fikri (2014: 125) perlu ada beberapa hal yang harus dicatunkan dalam regulasi pendidikan tinggi inklusif, yaitu: 1) adanya klausul bahwa perguruan tinggi wajib menyelenggarakan pendidikan inklusif; 2) menentukan standarisasi perguruan tinggi yang akan menyelenggarakan pendidikan inklusif berdasarkan otonomi akademik maupun non akademik; 3) memberikan sanksi kepada perguruan tinggi yang tidak menyelenggarakan pendidikan inklusif; 4) menghapus klausul pendidikan khusus; 5) memberikan beasiswa khusus difabel; 6) memberikan bantuan kepada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan inklusif; 7) menyiapkan dan menyediakan aksesibilitas mahasiswa difabel, melalui asesmen.

Secara legal formal Permendiknas Nomor 46 Tahun 2014 memberikan keluasan difabel untuk mengakses pendidikan tinggi, namun penggunaan istilah pendidikan khusus menurut Abdullah Fikri (2014: 123) masih memiliki konotasi negatif, karena perspektif yang dibangun adalah pendidikan segregasi yang menunjukkan pandangan negatif terhadap kaum difabel dalam aspek akademik.

2.2.1.5. Model Pembelajaran Kelas Inklusif di Perguruan Tinggi

Pendidikan inklusif lebih berorientasi pada pengembangan sikap difabel yang lebih komprehensif baik intelektual maupun sosial sebagai produk dari belajarnya. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara benar. Peserta didik seharusnya tidak hanya diajarkan untuk bisa *survive* tetapi juga harus berkembang baik kemampuan akademik, motorik, maupun kehidupan sosialnya.

Perguruan tinggi inklusif memiliki sistem pengajaran yang adaptif, meliputi modifikasi strategi pembelajaran, metode evaluasi, bahan ajar dan alat bantu (media). Pada subbab ini hanya akan dibahas tiga hal yaitu metode pembelajaran, bahan ajar dan media pembelajaran, sedangkan metode evaluasi akan dijabarkan pada sub bab yang berbeda.

Deschenes, C., Ebeling, D., and Sprague, J., (1994) mengemukakan tentang *adapting instruction*, dimana ada 9 (sembilan) cara untuk melakukan adaptasi pembelajaran bagi difabel, yaitu *size, time, level of support, input, difficulty, output, participation, alternate, substitute curriculum*.

Size	Time	Level of Support
<p>Adapt the number of items that the learner is expected to learn or complete. For example: If student is to know the fifty states, have students only be responsible for remembering a certain number at a time. This would be dependent on the student's level of disability.</p>	<p>Adapt the time allotted and allowed for learning, task completion, or testing. For example: Allow student additional time to complete timed assignments. However, if the total project is due by a particular time, have the student complete each portion of the project over various intervals with the required finished project due at a later time.</p>	<p>Increase the amount of personal assistance with a specific learner. For example: Allow for peer teaching. Pair the slower students in order to provide support. Offer some sort of incentive to the more advanced student for assisting others. Design some type of contract with students that they could show to their parents indicating completion of their work and the assistance they are giving to others.</p>
Input	Difficulty	Output
<p>Adapt the way instruction is delivered to the learner. For example: Provide students with a audio and/or video tape of the lesson. Allow for field trips, guest speakers, peer teaching, computer support, video productions performed by students, Incorporate lesson in other subjects areas</p>	<p>Adapt the skill level, problem type, or the rules on how the learner may approach the work. For example: Allow the student to be creative providing that task is completed according to instructor's specifications. For example the student may draw a picture of the assignment, do an interview, etc. depending on subject. Allow the student to come up with the idea. Accept any reasonable modifications.</p>	<p>Adapt how the student can respond to instruction. For example: Allow students to draw pictures, write an essay, complete specific computer software program relating to lesson.</p>
Participation	Alternate	Substitute Curriculum
<p>Adapt the extent to which a learner is actively ^{involved} in the task. For example: Tailor the student's participation in a task to his or her abilities, whether intellectual or physical.</p>	<p>Adapt the goals or outcome expectations while using the same materials. For example: In a writing assignment, alter the expectations for a disabled student who takes longer to write a paragraph.</p>	<p>Provide different instruction and materials to meet a student's individual goals. For example: Instead of discussing the reasons for the civil war, have the disabled student work on a puzzle showing the Union and Confederate states.</p>

Gambar 2.1.

Sembilan Cara Melakukan Pembelajaran yang Adaptif

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa adaptasi pembelajaran bagi difabel perlu mempertimbangkan berbagai aspek. Misalnya aspek *size*, pendidik bisa memperkecil ruang lingkup materi ajar yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik difabel. Kemudian aspek *time*, pendidik bisa memberikan tambahan waktu bagi peserta didik difabel untuk menyelesaikan tugas atau ujian. Pendidik juga perlu mempertimbangkan aspek *level of support* melalui *peer teaching* atau tutor sebaya sehingga pembelajaran terhadap peserta didik difabel menjadi lebih efektif.

Adaptasi pembelajaran juga bisa dilakukan dengan mempertimbangkan aspek *input* melalui pemberian akomodasi dalam bentuk media pembelajaran yang *adaptable* seperti menyediakan peralatan audio atau video, komputer, video produksi dan lainnya. Aspek *difficulty* juga perlu mendapat perhatian, misalnya peserta didik difabel diperbolehkan untuk menjawab soal dalam bentuk gambar, ujian dalam bentuk lisan, atau menjawab soal dalam bentuk audio atau rekaman. Peserta didik difabel juga harus diorientasikan pada *output* misalnya menulis sebuah esai meskipun dalam bentuk yang sederhana. Pendidik juga perlu menekankan aspek *participation* atau keaktifan peserta didik difabel selama proses pembelajaran. Tujuan atau hasil yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran juga harus disesuaikan dengan kondisi difabilitas peserta didik. Ekpektasi yang tinggi hanya akan membebani peserta didik itu sendiri. Disamping itu, pendidik harus memberikan instruksi dan materi yang berbeda untuk memenuhi tujuan setiap individu peserta didik.

Menurut Ro'fah, dkk. (2010: 41-43) model pembelajaran dalam setting pendidikan tinggi inklusif meliputi:

(1) Kontrak Belajar

Kontrak belajar dilakukan secara individual dan secara klasikal. Kontrak belajar individual idealnya dibuat oleh dosen bersama dengan mahasiswa difabel yang dilakukan dengan cara diskusi terkait dengan kebutuhan pembelajaran yang lebih spesifik.

(2) Setting Kelas

Setting kelas inklusif ini terkait dengan penataan furnitur dan prasarana yang ada di dalam kelas. Furnitur dan prasarana yang digunakan harus aman dan aksesibel bagi difabel. Dosen dan mahasiswa non difabel hendaknya memberikan orientasi mobilitas kepada mahasiswa difabel. Ketika ada pemindahan waktu dan ruang kuliah, direkomendasikan kepada dosen untuk memastikan informasi tersebut sampai kepada mahasiswa difabel.

(3) Dinamika Kelas

Kelas inklusif harus disetting sedemikian rupa supaya mahasiswa difabel dapat belajar dengan baik, misalnya tidak menempatkan mahasiswa difabel di kelas yang bising, menempatkan mahasiswa difabel di kursi depan atau dekat dengan dosen, tidak menempatkan mahasiswa difabel dalam satu kelompok belajar secara bersama-sama.

(4) Proses belajar mengajar

Proses pembelajaran harus dilaksanakan seefektif mungkin dengan berbagai strategi, misalnya dosen mengeja istilah teknis/istilah asing yang

digunakan dan menyediakan daftar istilah dalam bentuk yang aksesibel. Dosen harus menarasikan objek visual yang diterangkan di kelas atau dalam buku referensi kuliah. Menerangkan dari (sub) konsep yang detail, sebelum menerangkan konsep global. Memulai contoh dari contoh-contoh konkrit yang sering dilakukan sehari-hari, setelah itu berpindah kepada konsepsi yang abstrak.

Metode pembelajaran yang kompetitif lebih nyaman bagi difabel. Oleh karena itu, dosen tidak perlu ragu untuk bertanya kepada mahasiswa penyesuaian apa yang dibutuhkan ketika akan berpindah tema atau strategi pembelajaran yang baru. Dosen juga perlu mempertimbangkan aktivitas akademik di luar kampus apabila tidak aksesibel.

(5) Media

Dosen mengakomodasi kebutuhan belajar difabel dengan cara menggunakan alat bantu yang berbeda-beda sesuai dengan difabilitas dan *resources* yang dimiliki.

(6) Materi

Bahan ajar dapat diberikan kepada mahasiswa difabel dalam bentuk soft copy. Daftar referensi dapat diberikan kepada mahasiswa difabel lebih awal karena mereka butuh waktu untuk mengakses informasi lebih lama. Bahan ajar diusahakan tidak banyak memakai *visual content*.

2.2.1.6. Modifikasi Lingkungan Ramah Difabel

Salah satu isu difabilitas yang menjadi perhatian adalah aksesibilitas, baik lingkungan fisik maupun sosial. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Aksesibilitas untuk Penyandang Cacat, aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk difabel dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Oleh karena itu dalam perencanaan dan implementasi lingkungan perlu memperhatikan asas keselamatan, kemudahan, kegunaan dan kemandirian, khususnya bagi difabel.

Sesuai UU No. 8 Tahun 2016 Pasal 1 (8) bahwa aspek aksesibilitas memuat tentang aspek kemudahan. Kaum difabel harus mendapatkan kemudahan dalam mengakses suatu lingkungan. Hal ini perlu dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi difabel. Oleh karena itu, fasilitas publik harus didesain dengan menerapkan prinsip-prinsip aksesibilitas guna memberikan kesempatan yang sama bagi kaum difabel.

Secara lebih detail Permen PU Nomor 30 tahun 2006 di atas memberikan deskripsi tentang aspek-aspek aksesibilitas yaitu meliputi (1) keselamatan bagi semua orang, (2) kemudahan dalam mencapai suatu tempat, (3) kegunaan suatu fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang, dan (4) kemandirian dalam menggunakan suatu fasilitas tanpa bantuan orang lain.

Unite Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP) menyebutkan bahwa ada empat prinsip utama yang harus diterapkan dalam menciptakan lingkungan yang aksesibel, yaitu: (1) Semua orang

tanpa terkecuali harus bisa mencapai semua tempat dan lingkungan public, (2) Semua orang tanpa terkecuali harus bisa masuk semua tempat dan lingkungan public, (3) Semua orang tanpa terkecuali harus bisa menggunakan semua fasilitas yang ada di tempat atau lingkungan publik tersebut, (4) Semua orang tanpa terkecuali harus bisa mencapai, masuk, dan menggunakan semua fasilitas yang ada di lingkungan publik tersebut, tanpa merasa menjadi obyek belas kasihan apalagi pelecehan hak sosial.

Kaitannya dengan aksesibilitas lingkungan fisik bagi mahasiswa difabel maka perlu ada modifikasi lingkungan. Beberapa sarana yang perlu penyesuaian dengan kondisi difabel di antaranya adalah (Ro'fah, dkk., 2010: 37-41):

(1) *Ram* (tangga landai)

Aksesibilitas bangunan bisa dilihat dari ketersediaan *ram* pada setiap pintu masuk gedung untuk memberikan akses bagi pengguna kursi roda dan mahasiswa difabel netra. Berdasarkan Permen PU No. 30/PRT/M/2006 dimensi ruang toilet aksesibel ini adalah 2 x 2,375 m yang berisi kloset duduk yang dilengkapi *handrail* pada dinding di sekelilingnya. Selain itu, bukaan lebar 1 meter dengan pintu geser lipat dipilih untuk memudahkan membuka pintu sekaligus mengatasi keterbatasan ruang untuk membuat pintu geser penuh.

(2) *Lift* (*escalator*)

Idealnya gedung yang terdiri dari lebih dari satu lantai harus memiliki *lift*. Keberadaan *lift* ini sangat membantu para difabel dalam mengakses ruang-ruang yang ada di kampus.

(3) Pintu otomatis

Ketersediaan pintu otomatis yang memiliki sensor gerak, yang dapat membuka dan menutup secara otomatis juga dapat membantu mahasiswa difabel dalam mengakses suatu gedung secara mandiri.

(4) Kamar mandi khusus difabel

Kamar mandi khusus difabel, dengan ruang yang lebih luas sehingga mempermudah mahasiswa pengguna kursi roda serta dilengkapi dengan closet duduk dan rail pengaman.

(5) Penggunaan huruf *braile*

Penggunaan huruf *braile* untuk nama, nomor dan ruang bangunan sehingga mahasiswa difabel dapat mengaksesnya secara mandiri. Selain itu, karena keterbatasan sensori mahasiswa difabel maka perlu disediakan arah dan petunjuk lokasi penting yang ada di kampus. Disamping itu, perbedaan lokasi bisa berdasarkan warna, bentuk, ukuran, suara, bau, dan lain-lain. Perbedaan lokasi ini harus dikenalkan kepada mahasiswa difabel ketika orientasi dan mobilitas di awal kuliah. Arah petunjuk lainnya adalah perbedaan landmark.

(6) Menutup saluran air (got)

Saluran air (got) serta lubang-lubang yang ada di jalan perlu ditutup sehingga aman bagi mahasiswa difabel.

(7) Pengaturan tempat parkir

Pengaturan tempat parkir harus jelas, karena penempatan kendaraan yang tidak tepat khususnya di jalan-jalan utama sangat membahayakan bagi mahasiswa difabel.

(8) Jarak dan mobilitas fisik

Jarak dan mobilitas fisik juga perlu diperhatikan. Jarak yang panjang antar ruang yang dipakai secara bersamaan akan sangat menyusahakan mahasiswa difabel netra yang cenderung mengalami keterbatasan mobilitas. Disamping itu, kondisi lantai yang licin, pintu yang berat, atau jalan yang sempit juga dapat menghambat mobilitas mahasiswa difabel.

(9) Penyesuaian aspek visual

Penyesuaian aspek visual dengan kondisi mahasiswa difabel. Mahasiswa difabel yang sangat sensitive terhadap cahaya, maka cahaya yang terang tidak nyaman, sedangkan bagi *low vision* dan difabel dengan keterbatasan pendengaran membutuhkan pencahayaan yang lebih terang. Oleh karena itu, kebutuhan individual mahasiswa difabel perlu diakomodir sebelum menentukan ruang yang akan digunakan.

(10) Aspek akustik atau audio.

Desain kampus harus mengakomodasi kebutuhan akan akustik atau audio mahasiswa difabel, di antaranya: 1) frekuensi suara (tinggi, sedang, rendah), 2) tingkat kebisingan, 2) gema di dalam ruangan.

(11) Lingkungan sensori dan temperatur.

Penggunaan sensori input yang berbeda dapat meningkatkan pengalaman belajar yang positif, misalnya pengalaman mencium bau yang harum, lingkungan yang sejuk dan lain sebagainya. Pengalaman sensori seperti sangat bermanfaat bagi mahasiswa difabel, khususnya yang memiliki keterbatasan visual.

(12) *Furniture* dan prasarana yang aman

Furniture dan prasarana lainnya harus aksesibel dan adaptif serta aman bagi mahasiswa difabel. Peletakan meja dan *furniture* tidak menghalangi jalan masuk. Menghindari peralatan yang membahayakan seperti peralatan yang ujungnya tajam dan lain sebagainya. Kurniawan (2014: 12) menjelaskan bahwa penataan *furniture* merupakan usaha minimal untuk membuat ruang yang lebih fleksibel tanpa harus merubah dimensi ruang atau merubah pola kegiatan yang sudah ada.

(13) Ketersediaan peralatan adaptif

Perguruan tinggi juga harus menyediakan komputer adaptif, *scanner* dan *notetaker*. Disamping itu perlu ada *large print materials*, lensa pembesar, CCTV bagi mahasiswa *low vision*.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 juga memuat tentang standar lingkungan yang perlu disediakan perguruan tinggi inklusif, yaitu: (1) *Lift* pada gedung berlantai dua atau lebih, (2) Pelabelan dengan tulisan *braille* dan informasi dalam bentuk suara, (3) Lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda, (4) Jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, (5) Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, (6) Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda, (7) Media dan sumber belajar khusus, antara lain: buku-buku *braille*, buku bicara (*talking book*), komputer bicara, pemindai (*scanner*) dan mesin cetak *braille*, berbagai materi perkuliahan atau bahan bacaan yang berbentuk elektronik,

perpustakaan yang mudah diakses, atau informasi visual dan layanan informasi berbasis laman (web) yang memenuhi standar aksesibilitas laman (web).

Karakteristik setting lingkungan lembaga pendidikan mempengaruhi partisipasi peserta didik. Pendidik harus mempertimbangkan faktor lingkungan dan tidak hanya terfokus pada aspek individu. Untuk tujuan praktis dalam proses pembelajaran umumnya lebih mudah merubah lingkungan daripada anak (Egilson & Traustadottir, 2009: 271). Lingkungan pembelajaran harus disetting sesuai dengan kebutuhan mahasiswa difabel, sehingga pembelajaran lebih efektif.

2.2.1.7. Urgensifitas Unit Layanan Difabel

Keberadaan lembaga yang memberikan layanan untuk mahasiswa difabel mutlak diperlukan. Seringkali diskriminasi dan opresi yang dialami oleh mahasiswa difabel secara berangsur-angsur terinternalisasi dan kemudian berdampak pada kondisi psikologisnya. Dampak psikologis ini pada titik tertentu akan mengganggu mahasiswa difabel dalam menjalani perkuliahan. Lembaga mahasiswa difabel diperlukan untuk mengeliminasi dampak-dampak diskriminasi dan opresi yang mereka alami sehari-hari (Asyabuddin, 2008: 406-519). Dalam hal ini unit layanan difabel memposisikan diri sebagai konselor, yang memberikan bimbingan serta advokasi terhadap mahasiswa difabel.

Fungsi dari unit layanan difabel tersebut di antaranya adalah memfasilitasi atau mengakomodasi kebutuhan akademik mahasiswa difabel. Keterbatasan yang dialami mahasiswa difabel perlu mendapatkan perhatian, salah satunya melalui unit layanan difabel. Unit layanan difabel dapat membantu memberikan akses

terhadap aktifitas akademik mahasiswa seperti membantu pelayanan administrasi akademik, akses sumber belajar, bantuan mobilitas dan lain sebagainya.

Prinsip-prinsip yang harus ada dalam pendirian unit layanan difabel diantaranya adalah: (1) mengacu pada model pengembangan, (2) intervensi dini dan berkesinambungan, (3) prosedur program yang tersistem, (4) program sesuai dengan kondisi difabilitas, (5) memiliki layanan penunjang seperti psikologis, sosial, medis, pendidikan dan hukum, (6) penilaian terhadap kemajuan lembaga yang obyektif (Bagaskorowati, 2010: 135-137).

Fungsi dari unit layanan difabel menyangkut tiga hal, yaitu: (1) fungsi pengembangan, yaitu memonitor perkembangan mahasiswa difabel untuk mengembangkan kemampuannya ke arah yang lebih baik. (2) fungsi penyesuaian, yaitu membantu mahasiswa difabel menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik penyesuaian psikologis maupun emosional. (3) fungsi penyaluran, yakni dengan pengarahan pengembangan kemampuan, minat dan bakat yang diorientasikan supaya mahasiswa difabel dapat memiliki suatu pekerjaan yang mungkin dapat dilakukannya (Bagaskorowati, 2010: 137-138).

Kegiatan yang dapat dilakukan unit layanan difabel di antaranya adalah *direct* dan *indirect services*. *Direct services* berkaitan dengan pendampingan secara langsung terhadap difabel yang bersifat jangka pendek. Pendampingan tersebut bersifat praktis, teknis dan layanan *day to day* seperti pelayanan fasilitas adaptif, *notetaking*, *reading assistance*, *transcription assistance*, *library research assistance*, pendampingan ujian, *mobility assistance program*, *peer counseling/peer buddies*, *peer tutoring*, dan *support group/self-help group*.

Sedangkan *indirect services* berkaitan secara tidak langsung dengan pendampingan difabel secara teknis, berkaitan dengan inisiatif advokasi, berdampak jangka panjang, dan bernilai strategis. *Indirect services* ini di antaranya adalah audiensi, *social action*, *best practices*, *legal drafting*, penelitian, dan sosialisasi/*consciousness raising* (Ro'fah, dkk., 2010: 24-33).

2.2.2. Sistem Penilaian Kelas Inklusif di Perguruan Tinggi

2.2.2.1. Assessment Kebutuhan Mahasiswa Difabel

Pendidikan inklusif dirancang untuk memberikan layanan peserta didik difabel supaya dapat mencapai prestasi sesuai dengan potensi dan kapasitasnya. Implementasi pendidikan inklusif dimulai dengan memahami kebutuhan para difabel. Oleh karena itu identifikasi dan *assessment* kebutuhan belajar peserta didik menjadi langkah awal yang mendasari penyesuaian kurikulum dan proses pembelajaran (Mahabbati, 2014: 31). *Assesment* kebutuhan mahasiswa difabel di meliputi:

(1) Screening universal

Screening universal adalah upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengintervensi peserta didik yang mengalami difabilitas dan kesulitan yang dihadapi dalam akademik sedini mungkin berbasis data atau informasi yang akurat (Friend dan Bursuck, 2015: 212). Hugest dan Dexter dalam Friend dan Bursuck (2015: 212) menyatakan bahwa suatu pengukuran screening yang efektif haruslah akurat, praktis, dan tidak memberikan dampak negatif atau yang tidak diinginkan bagi peserta didik.

Sebuah rangkaian screening yang mengukur sejumlah aspek dalam suatu ranah akademis akan lebih akurat dibandingkan sebuah tes yang hanya mengukur satu aspek. Dalam konteks perguruan tinggi memang belum ada format yang baku, namun screening bisa dilakukan dalam rangka mengidentifikasi kesulitan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan.

(2) Diagnosis

Diagnosis dilakukan guna mengidentifikasi sejauhmana tingkat difabilitas seseorang (Friend dan Bursuck, 2015: 212). Diagnosis mengindikasikan masalah spesifik dan diarahkan pada usaha mengomunikasikan secara efisien informasi tentang individu berisiko kepada profesional lain, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang akurat (Bagaskorowati, 2010: 68-69).

Diagnosis juga berfungsi untuk mengklasifikasikan peserta didik berdasarkan ketunaan supaya nantinya intervensi atau akomodasi yang dilakukan sesuai dengan kondisi difabilitas mahasiswa. Diagnosis bisa juga dilakukan dengan melibatkan keluarga yang mengetahui riwayat difabilitas mahasiswa, supaya data yang diperoleh benar-benar akurat. Dukungan yang baik dari keluarga khususnya orang tua baik secara moral maupun spiritual dapat meningkatkan rasa percaya diri para difabel sehingga mampu meningkatkan prestasinya (Wijayanti, dkk., 2016: 23).

(3) Penempatan Program

Keputusan penempatan program berkaitan dengan ranah yang berkaitan dengan proses pembelajaran mahasiswa (Friend dan Bursuck, 2015: 215). Apakah mahasiswa difabel harus dijadikan satu dalam satu program pembelajaran secara bersama-sama atau dipisah. Hal ini berkaitan dengan efektifitas pembelajaran dan akomodasi yang diberikan.

(4) Penempatan Kurikulum

Penempatan kurikulum meliputi keputusan mengenai level mana yang akan dipilih untuk memulai pengajaran. Informasi mengenai penempatan kurikulum juga dapat dijadikan patokan pengukuran bagi pendidik untuk mengetahui sejauhmana mahasiswa difabel mengakses kurikulum yang ada (Friend dan Bursuck, 2015: 216). Penempatan kurikulum mungkin bisa dilakukan di kelas-kelas tertentu seperti kelas bahasa, dimana penempatan mahasiswa dilakukan berdasarkan placement test. Hal ini penting untuk dilakukan supaya metode pembelajaran yang dilakukan oleh dosen sesuai dengan tingkat kemampuan mahasiswa difabel.

(5) Evaluasi Pengajaran

Evaluasi pengajaran dilakukan untuk membuat keputusan apakah prosedur pengajaran yang dilakukan sudah sesuai dengan kondisi mahasiswa difabel atau belum. Keputusan ini dibuat dengan memantau kemajuan mahasiswa difabel secara cermat (Friend dan Bursuck, 2015: 217). Evaluasi pengajaran

dilakukan supaya proses pembelajaran menjadi lebih baik dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan telah tercapai, khususnya bagi mahasiswa difabel.

(6) Evaluasi Program

Evaluasi program meliputi keputusan untuk melanjutkan, memodifikasi atau menyempurnakan program (Friend dan Bursuck, 2015: 217), dalam hal ini adalah program pendidikan inklusif di perguruan tinggi. Evaluasi program perlu dilakukan guna mengetahui kelebihan dan kelemahan program tersebut, misalnya terkait dengan kurikulumnya, sarana prasarana, sumber daya manusia, pembiayaan dan lain sebagainya.

2.2.2.2. Assessment Pembelajaran

Teknik penilaian yang bisa dilakukan oleh pendidik untuk mahasiswa difabel di antaranya tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan kondisi difabilitas mahasiswa. Kustawan (2013: 54) menawarkan beberapa teknik penilaian dan bentuk instrument yang bisa digunakan dapat dilihat pada tabel 2.1.

Implementasi penilaian pembelajaran mahasiswa difabel perlu dilakukan dengan melakukan akomodasi dan menggunakan desain universal, supaya bisa diakses oleh semua mahasiswa difabel. Menurut Lazarus, dkk dalam Friend dan Bursuck (2015: 222) desain universal merupakan suatu gagasan bahwa tes dirancang dengan dukungan *built in* untuk meminimalisasikan kebutuhan terhadap

akomodasi. *Assessment* yang desainnya universal harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Item dapat diakses dan tidak bias, (2) Instruksi dan proses dibuat sederhana, jelas dan intuitif, (3) Tingkat keterbacaan dan keterpahaman yang maksimal, (4) Kejelasan bentuk huruf yang maksimal, (5) Instrument yang dibuat sesuai dengan kompetensi yang akan diukur.

Table 2.2.

Teknik Penilaian dan Bentuk Instrumen

Teknik Penilaian	Bentuk Instrumen	Keterangan
Tes Tertulis	- Tes objektif - Tes uraian	Mahasiswa difabel fisik
Tes Kinerja	- Tes ketrampilan menulis - Tes simulasi - Tes petik kerja	Semua mahasiswa difabel
Observasi	- Pedoman observasi	Semua mahasiswa difabel
Penugasan	- Tugas rumah - Proyek	Semua mahasiswa difabel
Tes lisan	Daftar pertanyaan	Mahasiswa difabel fisik
Portofolio	Lembar portofolio	Semua mahasiswa difabel
Jurnal	Buku catatan jurnal	Semua mahasiswa difabel
Inventori	Pedoman inventori	Semua mahasiswa difabel
Penilaian Diri	Kuesioner/lembar penilaian diri	Mahasiswa difabel fisik
Penilaian teman sebaya	Lembar penilaian teman sebaya	Mahasiswa difabel fisik

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus pada Pendidikan Tinggi juga menyebutkan cara *assessment* yang bisa dilakukan di perguruan tinggi inklusif berupa: (1) penyajian naskah soal dalam tulisan *braille*, (2) pembacaan soal-soal ujian oleh tenaga

pendamping di perguruan tinggi, (3) penyajian soal ujian dalam bentuk elektronik, yang dioperasikan dan dikerjakan melalui komputer bicara, atau (4) penyediaan bentuk evaluasi alternatif yang setara

Jenis akomodasi yang bisa diberikan terkait dengan implementasi penilaian mahasiswa difabel di antaranya adalah: (1) Menyediakan waktu tambahan, (2) Menyediakan waktu tak terbatas, (3) Pengujian selama lebih dari beberapa hari, (4) Penyesuaian urutan pengujian, (5) Pemberian waktu istirahat sesuai dengan yang dibutuhkan (Friend dan Bursuck, 2015: 222).

Lingkungan tempat berlangsungnya *assessment* juga perlu mendapatkan perhatian, misalnya: (1) Pengujian di lokasi terpisah bagi mahasiswa difabel, (2) Pengujian individual atau dalam kelompok kecil, (3) Menyediakan tempat duduk khusus, (4) Menyediakan peralatan adaptasi, (5) Membuat pengaturan lingkungan seperti pencahayaan dan audio, (6) Menghilangkan berbagai hal yang dapat mengalihkan perhatian mahasiswa difabel, seperti suara gaduh atau bising (Friend dan Bursuck, 2015: 222).

Metode penyajian instrument penilaian juga perlu di desain sesuai dengan kondisi difabilitas mahasiswa, seperti: (1) Menggunakan *braille* atau materi cetak yang besar, (2) Menambah jarak antar item, (3) Memperbesar ruang untuk mengisi jawaban, (4) Mengurangi jumlah item pada tiap halaman, (5) Pengujian secara lisan, (6) Menyertakan tanda/isyarat pada lembar jawaban (seperti tanda panah dan tanda berhenti), (7) Hanya menampilkan satu kalimat per baris (Friend dan Bursuck, 2015: 222).

Metode respon atau jawaban terhadap tiap item soal juga perlu diperhatikan, sebagai contoh: (1) Menuliskan jawaban dalam booklet ujian, (2) Menggunakan kertas tambahan untuk jawaban hitungan, (3) Mendiktekan jawaban ke dalam alat perekam atau tulisan, (4) Menjawab dengan menggunakan teknologi (misalnya menggunakan program JAWS atau screen reader), (5) Menerima bantuan dengan menyalin naskah (Friend dan Bursuck, 2015: 222).

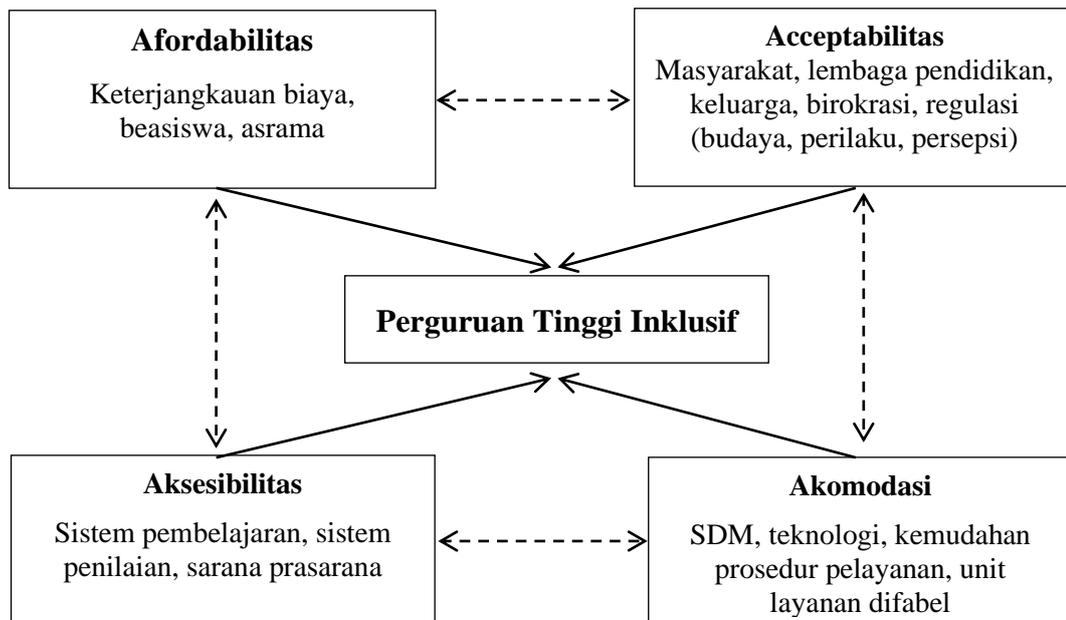
2.2.3. Pendekatan Integratif dalam Implementasi Pendidikan Tinggi Inklusif

Implementasi pendidikan tinggi inklusif memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk regulasi, sarana, sistem pendidikan, sikap, ataupun lainnya. Setiap komponen memiliki peran penting untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan. Oleh karena itu, pendidikan tinggi inklusif yang ramah difabel tidak bisa diwujudkan secara partial, tapi perlu direalisasikan melalui pendekatan integratif.

Pendidikan inklusif dan difabilitas merupakan salah satu fenomena sosial yang kompleks. Oleh karena itu perlu ada pemahaman yang komprehensif supaya tidak terjadi ketimpangan. George Ritzer (2010: 697) berusaha menyetengahkan kompleksitas masalah sosial ini dengan mengajukan konsep paradigma integratif yaitu paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Ketiga paradigma tersebut memiliki subject matter yang berbeda, yang meliputi semua tingkatan realitas, baik tingkat makro-obyektif seperti masyarakat, hukum, birokrasi dan bahasa, tingkat makro-subyektif seperti nilai, norma dan budaya, tingkat mikro-obyektif seperti pola perilaku, tindakan, dan interaksi, serta

tingkat mikro-subyektif seperti persepsi dan keyakinan. Pendekatan integratif yang ditawarkan George Ritzer bisa diadopsi untuk mewujudkan perguruan tinggi inklusif. Secara visual pendekatan integratif tersebut tertera pada gambar 2.2.

Dari gambar tersebut dapat dipahami bahwa ada empat hal pokok yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pendidikan tinggi inklusif yaitu afordabilitas, acceptabilitas, aksesibilitas, dan akomodasi. Keempat hal tersebut harus saling terkait dan saling mendukung. Acceptabilitas yang tidak diimbangi dengan pemberian akses dan akomodasi hanya akan menghasilkan pendidikan tinggi inklusif yang semu. Begitu juga dengan aksesibilitas dan akomodasi yang tidak diiringi dengan acceptabilitas dari masyarakat kampus, maka pendidikan tinggi inklusif tidak akan berjalan dengan maksimal. Meskipun begitu, itu semua tidak ada artinya jika perguruan tinggi tidak memiliki kebijakan tentang afordabilitas khususnya bagi mahasiswa difabel.



Gambar 2.2.

Pendekatan Integratif Pendidikan Tinggi Inklusif

2.3 Kerangka Berpikir

Sistem pembelajaran dan penilaian di perguruan tinggi masih menyisakan berbagai masalah. Salah satu fakta yang tidak dapat dibantah oleh perguruan tinggi adalah kehadiran mahasiswa difabel. Amanat undang-undang menyebutkan bahwa perguruan tinggi harus mengakomodir kebutuhan mahasiswa difabel, termasuk menyesuaikan sistem pembelajaran dan penilaian dengan kondisi difabilitas mahasiswa. Namun yang terjadi di lapangan sistem pembelajaran dan penilaian di perguruan tinggi belum memiliki *accecebility* yang baik. Sehingga mahasiswa difabel kesulitan mengikuti proses perkuliahan.

Minimnya *accecebility* ini dikarenakan sistem pembelajaran dan penilaian di perguruan tinggi masih didesain secara konvensional. Pembelajaran dalam setting kelas inklusif seharusnya memiliki desain tersendiri yang memungkinkan semua peserta didik baik difabel maupun non difabel dapat mengaksesnya dengan mudah. Desain pembelajaran dan penilaian yang *accecebible* seperti ini dinamakan desain universal atau biasa disebut dengan *Universal Design for Learning* (UDL). UDL dirancang untuk memenuhi kebutuhan semua peserta didik (<http://www.udlcenter.org>), dan proses pembelajaran yang dilakukan menggunakan desain universal terbukti lebih efektif bagi mahasiswa difabel (Courey *et al.*, 2012).

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti melakukan kajian secara kuantitatif terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa difabel dan dosen terkait aksesibilitas sistem pembelajaran dan penilaian di perguruan tinggi. Data kuantitatif ini penting untuk mengetahui apakah sistem

pembelajaran dan penilaian di perguruan tinggi sudah *acceccible*. Berdasarkan persepsi mahasiswa difabel dan dosen tersebut akan dilakukan kajian lebih lanjut yang sifatnya kualitatif.

Kajian kualitatif dilakukan untuk mengetahui bagaimana desain universal sistem pembelajaran dan penilaian yang telah diimplementasikan di perguruan tinggi. Melalui kajian kualitatif ini akan dilakukan analisis terkait dengan konsep ideal dan implementasinya di lapangan. Analisis dilakukan menggunakan teori *universal design for learning* dengan mempertimbangkan prinsip representasi, ekspresi dan tindakan, serta keterlibatan.

Disamping itu analisis juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan integratif. Sebagai sebuah fenomena sosial, kajian tentang difabilitas ini dilakukan menggunakan teori paradigma integratif yang ditawarkan oleh Ritzer yaitu paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Pendekatan ini penting untuk mengetahui bagaimana fakta sosial tentang pendidikan inklusif di lapangan, bagaimana masyarakat kampus mendefinisikan konsep inklusifitas di perguruan tinggi, dan bagaimana stakeholder memperlakukan mahasiswa difabel.

Melalui kajian-kajian tersebut akan ditemukan sebuah formula desain universal sistem pembelajaran dan penilaian yang ideal berdasarkan fakta-fakta di lapangan, tidak hanya dalam dataran konseptual tapi juga implementasinya. Hasil penelitian ini akan menghasilkan rekomendasi bagi perguruan tinggi untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif secara komprehensif dengan membuat desain pembelajaran dan penilaian yang sifatnya universal.

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi data pada bab sebelumnya, ada beberapa kesimpulan hasil penelitian ini yaitu:

Pertama, model pembelajaran yang digunakan di perguruan tinggi sudah *accessible* bagi mahasiswa difabel. Dari indikator dinamika kelas, pengelolaan pembelajaran, serta pemanfaatan media dan sumber belajar yang peneliti jabarkan dalam kuesioner, sebagian besar responden memilih jawaban Sering dan Selalu. Dua opsi jawaban tersebut mengindikasikan bahwa responden setuju jika model pembelajaran terhadap mahasiswa difabel di perguruan tinggi inklusif sudah *accessible*. Meskipun begitu ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan yaitu jumlah bahan ajar berbentuk digital dan penyampaian materi kuliah yang disesuaikan dengan tingkat difabilitas mahasiswa melalui *differentiated instructional*.

Kedua, sistem penilaian yang digunakan perguruan tinggi juga sudah *accessible* bagi mahasiswa difabel. Baik dosen maupun mahasiswa memiliki persepsi yang sama terhadap sistem penilaian di perguruan tinggi inklusif. Dari indikator kriteria item soal, waktu dan tempat pelaksanaan ujian, serta metode penyajian dan jawaban, sebagian besar responden memilih opsi Sering dan Selalu. Hal ini bisa diartikan sebagai sebuah kesepakatan kolektif bahwa sistem penilaian di perguruan tinggi sudah *accessible* bagi mahasiswa difabel. Meskipun secara

keseluruhan sistem penilaian di perguruan tinggi inklusif menunjukkan hasil yang positif namun ada beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian yaitu terkait dengan tingkat kesulitan akses item soal, jumlah item soal yang cukup banyak, dan tingkat kesukaran soal yang tinggi.

Ketiga, sistem pembelajaran pada setting kelas inklusif di perguruan tinggi didesain secara universal melalui pendekatan integratif. Beberapa langkah yang dilakukan untuk membuat desain universal pada sistem pembelajaran adalah: (1) Memahami kondisi difabilitas mahasiswa, (2) Memahami kebutuhan mahasiswa difabel, (3) Memahami cara berkomunikasi mahasiswa difabel, (4) Melakukan strategi pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kondisi difabilitas mahasiswa, (5) Memanfaatkan media pembelajaran yang adaptable, 6) Menggunakan sumber belajar yang aksesibel. Sedangkan kendala yang dihadapi mahasiswa difabel dalam proses pembelajaran, yaitu: *pertama*, mahasiswa difabel rungu mengalami kesulitan dalam pembelajaran bahasa khususnya untuk kompetensi *listening* (mendengar) dan *speaking* (berbicara); *kedua*, mahasiswa difabel netra mengalami kesulitan memahami materi yang berbentuk simbol atau rumus. Sedangkan dari sisi dosen, pembelajaran terhadap mahasiswa difabel rungu akan lebih efektif jika dosen menguasai bahasa isyarat, sayangnya belum banyak dosen yang menguasai bahasa isyarat. Oleh karena itu perlu ada gerakan budaya inklusi di perguruan tinggi dengan membiasakan menggunakan bahasa isyarat.

Keempat, sistem penilaian mahasiswa difabel pada kelas inklusif di perguruan tinggi sudah menggunakan desain universal dan dilakukan dengan pendekatan integratif. Langkah-langkah yang dilakukan perguruan tinggi untuk

menciptakan sistem penilaian yang universal adalah sebagai berikut: *pertama* membuat metode ujian yang lebih aksesibel, dengan cara; (1) menentukan kriteria item soal yang lebih variatif, (2) membuat metode penyajian instrument penilaian berbasis teknologi, (3) membedakan cara pelaksanaan ujian mahasiswa non difabel, (4) menyediakan tempat ujian yang representatif, (5) menentukan jenis akomodasi, dan (6) mengembangkan metode respon soal yang lebih fleksible. *Kedua*, membuat sistem penilaian yang lebih adil tanpa didasarkan pada belas kasihan. Kriteria penilaian yang selama ini diterapkan di perguruan tinggi adalah aspek keaktifan, kehadiran, ujian, dan tugas. Jika aspek tersebut diterapkan secara kaku terhadap mahasiswa difabel, maka prestasi mahasiswa difabel akan cenderung rendah.

8.2.Rekomendasi

Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa system pembelajaran dan system penilaian sudah aksesibel bagi mahasiswa difabel, namun ada beberapa rekomendasi yang perlu peneliti sampaikan yaitu:

(1) Bagi Dosen

Dosen memiliki andil besar bagi keberhasilan studi mahasiswa difabel. Dosen harus lebih *care* terhadap kebutuhan mahasiswa difabel. Kondisi difabilitas mahasiswa tidak memungkinkan untuk mengikuti proses pembelajaran seperti mahasiswa lainnya. Oleh karena itu, dosen harus mengupayakan sebuah sistem pembelajaran yang lebih ramah dan adaptable terhadap mahasiswa difabel melalui sebuah desain yang sifatnya universal.

(2) Bagi Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi perlu membuka diri dan memberikan akses yang luas kepada kaum difabel untuk mengenyam pendidikan tinggi. Pendidikan merupakan hak dasar setiap manusia yang harus dipenuhi, tanpa melihat kondisi, usia, gender, maupun kondisi ekonomi. Sistem pembelajaran dan penilaian di perguruan tinggi harus memperhatikan aspek aksesibilitas, oleh karena itu perguruan tinggi perlu menetapkan kebijakan tentang desain universal dalam sistem pembelajaran dan penilaian.

Perguruan tinggi juga perlu mencanangkan gerakan bahasa isyarat menjadi bahasa universal. Setiap orang memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi, begitu juga dengan mahasiswa difabel netra. Hambatan mendengar dan berbicara dapat diatasi melalui bahasa isyarat. Oleh karena itu, setiap komponen masyarakat kampus idealnya harus menguasai Bahasa isyarat, supaya mereka bisa membaaur selama alami tanpa harus merasa takut untuk berkomunikasi dengan siapapun.

Perguruan tinggi perlu melakukan gerakan budaya inklusi. Tidak hanya sekedar menumbuhkan kesadaran difabel tapi masyarakat kampus juga harus melakukan budaya inklusif. Budaya inklusif memungkinkan masyarakat kampus untuk memberikan hak-hak kaum difabel secara tepat. Misalnya kebiasaan melanggar rambu-rambu khusus difabel oleh mahasiswa, karena tidak adanya aturan yang tegas, sehingga mahasiswa dengan mudahnya melanggar. Jika setiap orang membudayakan untuk menghormati hak-hak kaum difabel, maka pelanggaran tersebut tidak akan terjadi.

(3) Bagi Mahasiswa Difabel

Mahasiswa difabel memiliki kesempatan yang sama untuk lebih berkembang dan sukses seperti anggota masyarakat pada umumnya. Kesuksesan itu merupakan pilihan dan ditentukan oleh diri sendiri. Mahasiswa difabel seharusnya tidak menyerah dengan keterbatasan yang ada pada dirinya, karena selalu ada cara untuk meraih sukses, salah satunya melalui pendidikan. Oleh karena itu, mahasiswa difabel harus lebih meningkatkan motivasi dan mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi, supaya bisa mencapai hasil yang maksimal. Disamping itu mahasiswa difabel harus terus meningkatkan kapasitas diri sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik.

(4) Bagi Masyarakat Kampus

Masyarakat kampus perlu menumbuhkan kesadaran difabel (*difabilities awareness*). Hindari perlakuan, sikap, dan ucapan yang diskriminatif terhadap mahasiswa difabel. Karena esensinya mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Hormati hak-hak mahasiswa difabel dengan cara mematuhi rambu-rambu yang dibuat khusus bagi mahasiswa difabel. Dengan menghormati hak-hak mahasiswa difabel berarti kita lebih humanis.

Kesadaran untuk memberikan tempat khusus saat proses pembelajaran, memberikan bantuan *notetaking*, membacakan materi terhadap mahasiswa difabel membantu membuat transkripsi, ataupun mendampingi mahasiswa difabel di perpustakaan merupakan bentuk dari *difabilities awareness*. Oleh karena itu masyarakat kampus perlu membiasakan hal itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas. M. Tashakkori & Charles, B. Teddlie. 2010. *Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research*: Amazon.co.uk.
- Agustriyana, Nur Astuti dan Nisa, Athia Tamyizatun. 2017. Perbedaan Keterampilan Sosial Siswa Berkebutuhan Khusus dan Tidak Berkebutuhan Khusus (Siswa Normal) di Sekolah Inklusi. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman*. Volume 3, Nomor 1, Tahun 2017. 12-16
- Ajuwon, Paul M. (2008). "Inclusive Education For Students With Disabilities In Nigeria: Benefits, Challenges And Policy Implications". *International Journal of Special Education*, Vol 23, No 3: 11-16.
- Al-Azawei, A., Serenelli, F., & Lundqvist, K. 2016. "Universal Design for Learning (UDL): A Content Analysis of Peer Reviewed Journal Papers from 2012 to 2015". *Journal of the Scholarship of Teaching and Learning*, Vol. 16(3): 39-56.
- Alimin, Zaenal. 2008. "Pemahaman Konsep Pendidikan Kebutuhan Khusus dan Anak Berkebutuhan Khusus". (Online). <http://zalimin.blogspot.com>.
- Anstead, Mary Jordan. 2016. *Teachers Perceptions of Barriers to Universal Design for Learning*. Disertasi. Walden University
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Astuti, □Widya Puji, Hari Wibawanto, dan Muhammad Khumaedi. 2015. Pengembangan Instrumen Penilaian Unjuk Kerja Praktik Perawatan Kulit Wajah Berbasis Kompetensi Di Universitas Negeri Semarang. *Innovative Journal of Curriculum and Educational Technology* 4 (1). 8 – 14
- Asyabuddin. 2008. "Difabilitas dan Pendidikan Inklusif: Kemungkinannya di STAIN Purwokerto", *Insania*, Vol. 13, No. 3, September-Desember.
- Aziz, Alfian Nur, Sugiman, Ardhi Prabowo. 2015. Analisis Proses Pembelajaran Matematika pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Slow Learner di Kelas Inklusif SMP Negeri 7 Salatiga. *Kreano* 6 (2) (2015): 111-120
- Azwar, Syaifuddin. 2009. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Bagaskorowati, Riana. 2010. *Anak Berisiko: Identifikasi, Asesmen, dan Intervensi Dini*. Bogor: Ghalia Indonesi.
- Bashiti, Alaa & Rahim, Asiah Abdul 2015. *A Study on The Accessibility in Shopping Malls for People with Disabilities (PWDS) in Malaysia*
- Carrington, Suzanne & Macathur, Jude. 2012. *Teaching In Inclusive School Communities*, Australia: John Wiley & Sons Australia, Ltd.
- Chapireau, Francois. 2005. "The Environment in the International Classification of Functioning, Disability and Health". *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities* 2005, 18, 305–311
- Churchill, Rick, et.all. 2011. *Teaching Making a Difference*. Australia: John Wiley & Sons Australia.
- Courey,S.J. Phyllis T., Jody S., and Pam L. 2012. "Improved Lesson Planning With Universal Design for Learning (UDL)". *SAGE, Teacher Education and Special Education*, Volume 36 (1): 7–27
- Creswell, J.W. (2002). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating, Quantitative and Qualitative Research*. Upper Saddle River: Pearson Education, Inc.
- Darmawan, Dani. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Deschenes, C., Ebeling, D., and Sprague, J., (2000), *Adapting Curriculum and Instruction in Inclusive Classrooms: A Teacher's Desk Reference*, Center on Education & Lifelong Learning, Indiana Institute on Disability and Community; 2nd edition.
- Direktorat PSLB. 2007. *Suplemen Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*. Jakarta: Direktorat PSLB.
- Egilson, S. T., & Traustadottir, R. 2009. "Participation of Students with Physical Disabilities in the School Environment". *American Journal of Occupational Therapy*, 63: 264–272.
- Eta Yuni Lestari, Slamet Sumarto, dan Noorochmat Isdaryanto. 2017. Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi *Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CPRD)* dalam Bidang Pendidikan. *Integralistik*. No.1/Th. XXVIII/2017, Januari-Juni 2017. 1 - 9

- Faisal, Sanafiah. 2001. *Format-format Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fikri, Abdullah. 2014. "Partisipasi Politik Masyarakat Difabel dalam Pembentukan Kebijakan Pendidikan Tinggi", *Jurnal Inklusi*, Vol. 1 No. 1 , Januari – Juni.
- Fogli, Daniela, Loredana Parasiliti Provenza, Cristian Bernareggi. 2014. "A Universal Design Resource for Rich Internet Applications Based on Design Patterns". *Univ Access Inf Soc*, Springer, Berlin. 13: 205–226.
- Formean, Phil, (Ed). 2008. *Inclusion in Action*, Second Edition. Australia: Harcourt.
- Fovet, Frederic. 2017. "Access, Universal Design and the Sustainability of Teaching Practices: a Powerful Synchronicity of Concepts at a Crucial Conuncture for Higher Education". *Indonesian Journal of Disability Studies*, Vol. 04 No.02: 117-128
- Friend, Marilyn dan Bursuck, William D., 2015. *Menuju Pendidikan Inklusi: Panduan Praktis untuk Mengajar*, Edisi Ketujuh, Terj. Annisa Nuriowandari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gradel, K., & Edson, A. J. 2010. "Putting universal design for learning on the higher ed agenda." *Journal of Educational Technology Systems*, Vol. 38(2), Page. 111-121
- Hamidi, Jazim, 2016. Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 4 Vol. 23 Oktober. 652 - 671
- Harrison, E. 2006. "Working with Faculty Toward Universally Designed Instruction: The Process of Dynamic Course Design", *Journal of Postsecondary Education and Disability*, Special Issue: Universal Design in Higher Education, Vol. 19 (2), Page. 152 – 162
- Haryono, Ahmad Syaifudin, Sri Widiastuti. 2015. Evaluasi Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Pendidikan*. Vol. 32 Nomor 2 Tahun 2015. 119-126.
- Hyde, Mervyn, Carpenter, Lorelei, and Conway, Robert. 2014. *Diversity, Inclusion, and Engagement*, Second Edition, Australia: Oxford University Press.

- Ilahi, Mohammad Takdir. 2013. *Pendidikan Inklusif: Konsep dan Aplikasi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Jefri, Tamba, “Aksesibilitas Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Tunadaksa di Universitas Brawijaya”, *IJDS* 2016; Vol . 3: No. 1: Page 16 – 25, 24.
- Johnsen, Berit H. and Skjorten, Miriam D. *Education – Special Needs*, Unifub Forlag, University of Oslo, 2001, Lihat http://www.idp-europe.org/docs/uio_upi_inclusion_book/6-menuju_inklusi_dan_pengayaan.php.
- Kasi, Yohanes Freadyanus. 2015. *Learning Design of Universal Design for Learning (udl) for Teacher in The Class Room With Kinds of Student In Science Learning*, Proceeding International Seminar on Mathematics, Science, and Computer Science Education, Bandung: Faculty of Matematics and Science Education Universitas Pendidikan Indonesia.
- Keswara, Ratih. “Perguruan tinggi belum ramah bagi penyandang difabilitas”, <http://nasional.sindonews.com>.
- King-Sears, Margaret E., et.all. 2015. *An Exploratory Study of Universal Design for Teaching Chemistry to Students Withand Without Disabilities*. *Learning Disability Quarterly*, Vol. 38 (2) 84 –96.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Grafindo Pustaka Utama.
- Kurniawan, Harry. 2014. *Tipologi Renovasi Aksesibilitas Halte Trans Jogja, Inklusi*, Vol.1, No.1 Januari - Juni.
- Kustawan, Dedy. 2013. *Penilaian Pembelajaran Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Luxima Metro Media.
- Kusumarini, Yusita & Utomo, Tri Noviyanto Puji. 2008. Konsep Desain Kamar Mandi Bertema ”Accessible Restroom” 2007: Analisis Penerapan Konsep ’Desain Universal’ Pada Sayembara Perancangan. *ITB J. Vis. Art & Des*. Vol. 2, No. 1. 85-98.
- Latifah, Siti dan Himawanto, Dwi Aries. 2017. ”Aksesibilitas Bagi Difabel pada Bangunan Hotel di Kota Surakarta”. *IJDS*, Vol. 4 No. 2, pp 129-136

- Lovett, B., Nelson, J.M., Lindstrom, W. (2014) "Documenting Hidden Disabilities in Higher Education: Analysis of Recent Guidance From the Association on Higher Education and Disability (AHEAD)", *Journal of Disability Policy Studies*, Vol 26 (1), Page 44 – 53
- Maftuhatin, Lilik. 2014. *Evaluasi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kelas Inklusif di SD Plus Darul 'Ulum Jombang*. Religi: Jurnal Studi Islam Volume 5, Nomor 2, Oktober 2014; ISSN: 1978-306X; 201-227.
- Maftuhin, Arif. 2016. "Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas". *Inklusi*. Vol. 3, No. 2, h. 139-162
- Magribi, La ode M. & Suhardjo, Aj.(2004). Aksesibilitas dan Pengaruhnya terhadap Pembangunan di Pedesaan: Konsep Model Sustainable Accessibility pada Kawasan Perdesaan Di Propinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Transportasi* Vol.4 No.2, pp. 149-160.
- Marino,M.T., Gotch C.M., Israel M., Vasquez E., Basham J.D & Becht K. 2014. *UDL in the Middle School Science Classroom: Can Video Games and Alternative Text Heighten Engagement and Learning for Students With Learning Disabilities?* SAGE, Volume : 37 (2).
- Meo, Grace. 2008. *Curriculum Planning for All Learners: Applying Universal Design for Learning (UDL) to a High School Reading Comprehension Program*. The Jurnal of Experimental Education, Vol. 52, No. 2.
- Monemi, Saeed. at. all. "Project Design Principles and Applications Using Universal Design Learning (UDL)". 2009. *American Society for Engineering Education*. 14.988.1
- Mudjito, Harizal, dan Elfindri. 2012. *Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Baduose Media.
- Muhadjir, Noeng. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasih.
- Mujimin, W.M. (2007). Penyediaan Fasilitas Publik yang Manusiawi bagi Aksesibilitas Difabel. *Jurnal Dinamika Pendidikan* No/Th.XIV Mei 2017, pp. 60-75.
- Mulyana, Deddy, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya.

- Murtakhamah, Titin. 2012. "Mengintip Kampus Ramah Difabel di Yogyakarta", www.edukasi.kompasiana.com
- National Center On Universal Design for Learning. (2012). What is Universal Design for Learning. CAST. <http://www.udlcenter.org/aboutudl/whatisudl>
- National Center On Universal Design for Learning. (2013). The Concept of UDL. CAST. <http://www.udlcenter.org/aboutudl/whatisudl/conceptofudl>
- Nurhayati, Syarifah dan Cahyati, Widya Hary. 2016. Hubungan Antara Status *Medical Check Up* Terhadap Kejadian Disabilitas Fisik Pada Lansia Di Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan, *UJPH* 5 (1), p. 84-89
- Pajankar, Vishal D. 2016. A Case Study on Accessibility of School in Tribal Areas and Its Implications on Educational Inclusiveness. *Journal of Educational and Practice*, Vol 7, No.19, pp. 10-13.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus pada Pendidikan Tinggi.
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Penyandang Difabilitas Pada Anak*.
- Reni A, A. Sopyan, N. Hindarto. 2013. Pengembangan Self Assessment Sebagai Alat Evaluasi Pendidikan Karakter Berbasis Konservasi pada Mahasiswa Pendidikan Fisika FMIPA UNNES. *Unnes Physic Education Journal* 2 (3). 40-46
- Ritzer, George. 2010. *Teori Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Riyanto, Yatim, 2001. *Metode Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Penerbit SIC.
- Ro'fah, Andayani, Muhrisun. 2010. *Membangun Kampus Inklusif: Best Practice Pengorganisasian Unit Layanan Difabel*. Yogyakarta: Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD) UIN Sunan Kalijaga.
- Sachs, Dalia. 2011. "Inclusion of Students with Disabilities in Higher Education: Performance and Participation in Student's Experiences". *Disability Studies Quarterly*. Vol. 31 No. 2. Springer, Berlin.
- Santoso, Meilanny Budiarti dan Apsari, Nurliana Cipta. 2017. "Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas". *Intermestic: Journal of International Studies*, Volume 1, No. 2, 166-176.

- Satriyadi, Liliek, Bambang Haryadi, Ismiyati. 2017. Prasarana Pedestrian di Lingkungan Kampus: Studi Kasus Kampus Undip dan Unnes. *Wahana Teknik Sipil*. Vol. 22 No. 1 Juni 2017. 58 - 70
- Sears, M. E. K., Johnson, T. M., Berkeley, S, Weiss, M. P., Burton, E. E. P., Evmenova, A. S., Menditto, A., & Hursh, J.C. (2014). An Exploratory Study of Universal Design for Teaching Chemistry to Students With and Without Disabilities. *International Journal of Inclusive Education*. Volume 13.
- Sharma, Arvind. 2015. "Perspectives on Inclusive Education with Reference to United Nations". *Universal Journal of Educational Research* 3(5): 317-321.
- Sholahuddin, Muhammad. 2007. Setting Ruang dan Pengaruhnya terhadap Aksesibilitas para Penyandang Cacat Tubuh di Pusat Rehabilitasi YAKKUM Yogyakarta. *Jurnal Lintas Ruang*, Vol.1 Edisi 1, pp. 3141.
- Sholeh, Akhmad. 2014. "Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Yogyakarta Terhadap Penyandang Difabilitas". *Jurnal Pendidikan Islam*. Volume III, Nomor 1, Juni.
- Sholikhah, Khimayatus. 2013. Penanganan Penyandang Cacat Melalui Pelatihan Menjahit di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang. *Journal of Non Formal Education and Community Empowerment*, 2. 57-60.
- Sinulingga, Isabella Novsima. 2015. "Keindahan dalam Disabilitas: Sebuah Konstruksi Teologi Disabilitas Intelektua". *Indonesian Journal of Theology*. 3/1: 35-60
- Sreejesh, S. dan Mohapatra. Sanjay. 2014. *Mixed Method Research Design*. New York: Springer.
- Student Accessibility Centre. 2008. *Accessibility Guide Book*. University of New Brunswick.
- Sudjana. 2001. *Metode Statistika*. Edisi Revisi. Cet. 6. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Surapranata, Sumarna, 2006. *Analisis, Validitas, Reliabilitas dan Interpretasi Hasil Tes Implementasi Kurikulum 2004*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Swain, J., & French, S. (2000) „Towards an affirmative model of disability“, *Disability and Society*, Vol. 15 (4), Page. 569-82.
- Syafiie, M.(2014). Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Inklusi* , Vol.1, No. 2 Juli - Desember 2014 (270-289)
- Tegmark-Chita, M., Gravel, J.W., Serpa, M. deL. B., Domings, Y., & Rose, D.H. (2012) “Using the Universal Design for Learning Framework to Support Culturally Diverse Learners”, *Journal of Education*, Vol. 192(1), Page. 17-22
- Tohari, Slamet, Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang, *Indonesian Journal of Disability Studies*, Vol. 1 Issue 1 June 2014, pp. 27-37
- UIN Sunan Kalijaga Perguruan Tinggi Inklusi di Yogyakarta, dan Sosok yang Berjasa terhadap Berdirinya PSLD - 16 May 2013 <https://www.solider.or.id/2013/05/16/uin-sunan-kalijaga-perguruan-tinggi-inklusi-di-yogyakarta-dan-sosok-yang-berjasa-terhadap>
- Ulfa, dkk. (2016). Aksesibilitas Bagi Difabel pada gedung Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. *Jurnal Special_Edu* Vol.2 No.1 , pp.4351.
- Unesco, “Unesco Concept Paper” dalam <http://portal.unesco.org/education>
- Unesco. 1994. *The Salamanca Statement and Framework For Action On Special Needs Education*. Spain: UNESCO.
- United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP). 1995. *Promotion of Non-Handicapping Physical Environments for Disable Person: Guidelines*, ST/ESCAP/1492, New York: United Nations. <http://www.dinf.ne.jp>.
- UU RI nomor 19/2011 tentang Ratifikasi CRPD.
- Wardany, Ossy Firstanti, dkk., 2017. “Aksesibilitas Lahan Parkir Dan Lift Bagi Individu Difabel Pada Pusat Perbelanjaan Di Kota Surakarta”. *IJDS*, Vol. 4 No. 1, pp27-34

- Widi, Narulita Anugrahing & Nirwansyah, Rullan. 2013. "Penerapan Aksesibilitas pada Desain Fasilitas Pendidikan Sekolah Luar Biasa". *Jurnal Sains dan Seni Pomits* Vol. 2, No. 2, pp.1-6 ISSN: 2337-3539.
- Widyantini, Ambar Retnosih. 2015. "Paradigma Human Right Based dalam Kerangka Hukum Penyandang Disabilitas". *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Vol. 2 No. 2, 172-179
- Wijayanti, Dwi Gansar Santi, Soegiyanto, Nasuka. 2016. Pembinaan Olahraga untuk Penyandang Disabilitas di National Paralympic Committee Salatiga. *Journal of Physical Education and Sport* 5 (1). 17 – 23.
- World Health Organization. 2001. *International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*, World Health Organization. Geneva.
- Yulianto, M. Joni. 2012. *Model Pembelajaran Kampus Inklusif*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Yulianto, M. Joni. 2014. "Konsep Difabilitas dan Pendidikan Inklusif". *Jurnal Inklusi*. Vol. 1. No. 1 Januari-Juni.